

**KEDUDUKAN ANAK TERTUA LAKI-LAKI
DALAM ADAT LAMPUNG SAIBATIN
DI KABUPATEN PESISIR BARAT**



Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi**



Oleh :

MIZARWAN

NPM : 1341040108

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRIRADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2018 M**

**KEDUDUKAN ANAK TERTUA LAKI-LAKI
DALAM ADAT LAMPUNG SAIBATIN
DI KABUPATEN PESISIR BARAT**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Oleh :

Mizarwan
NPM : 1341040108

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam



Pembimbing I : Dr. Hasan Mukmin, M.Ag
Pembimbing II : Badaruddin, S.Ag, M.Ag

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRIRADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2018 M**

Abstrak

KEDUDUKAN ANAK TERTUA LAKI-LAKI DALAM ADAT LAMPUNG SAIBATIN DI KABUPATEN PESISIR BARAT

**Oleh
MIZARWAN**

Anak tertua laki-laki dalam adat lampung saibatin mempunyai kedudukan yang lebih tinggi serta memegang peran penting di kehidupan keluarganya. Dalam keadatan masyarakat lampung pesisir anak tertua laki-laki memiliki tanggung jawab penuh terhadap keluarga, adat dan masyarakat. Anak tertua laki-laki disini adalah anak laki-laki pertama meskipun dia anak terakhir. Maka anak laki-laki tertua (anak tuha) dalam adat lampung harus memiliki kemampuan yang lebih karna mengingat tanggung jawab dan tugas yang di embannya.

Kedudukan anak tertua laki-laki dalam adat lampung saibatin di kabupaten pesisir barat sudah mengalami perubahan fungsi serta tidak menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan adat sebagaimana mestinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa kedudukan anak tertua laki-laki dalam adat lampung saibatin di kabupaten pesisir barat.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), bersifat *deskriptif*. Populasi dalam penelitian ini adalah 50 orang. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, maka sampel dalam penelitian ini adalah 25 orang yang memiliki gelar sultan (raja marga) dan sudah berkeluarga. Kakak tertua laki laki yang sesuai dengan kriteria penulis berjumlah 5 orang. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

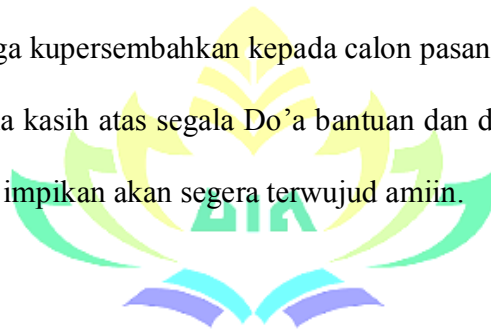
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak laki-laki tertua Dalam adat lampung saibatin di kabupaten pesisir barat memiliki tugas dan tanggung jawab dalam keluarga dan masyarakat yaitu sebagai ahli waris, sebagai pemimpin keluarga dan sebagai pengayom keluarga. Dalam artian dia bertanggung jawab terhadap adik dan kakak perempuannya.

Keywords: Kedudukan Anak Tertua Laki-laki dalam Adat Lampung Saibatin.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta yang tiada henti-hentinya mencurahkan kasih sayangnya, memberikan pengorbanan, serta tiada bosan selalu mendoakan penuh harapan untuk keberhasilanku yaitu Ayahanda Hazuan dan Ibunda Ainun Cahya. Terimakasih atas do'a dan dukungan yang tiada hentinya.
2. Kakak-kakakku dan adekku tersayang, Sobrawi, Eka Diana, Erti Siyah Nandir Syah yang senantiasa memberikan senyuman dan dukungan beserta Do'a sehingga menambah semangat belajar serta mendoakan keberhasilanku.
3. Skripsi ini juga kupersembahkan kepada calon pasanganku Deka Marpeni. S.Kom, terima kasih atas segala Do'a bantuan dan dukungannya. Semoga apa yang kita impikan akan segera terwujud amiin.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tanjung Jati, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 08 Maret 1991. Anak keempat (IV) dari lima (V) bersaudara, dari pasangan Bapak Hazuan dan Ibu Ainun Cahya.

Adapun pendidikan yang telah ditempuh penulis dimulai tahun 1997:

1. SD Negeri Tanjung Sakti, Kecamatan Lemong, Kabupaten Lampung Barat lulus tahun 2003
2. SMP Negeri 2 Lemong, Kecamatan Lemong, Kabupaten Lampung Barat lulus tahun 2007
3. SMA Negeri 1 Lemong, Kecamatan Lemong, Kabupaten Lampung Barat lulus tahun 2010. Dan pada tahun 2013 penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi di IAIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) jurusan Bimbingan dan Konseling Islam (BKI).

Penulis pernah berperan dalam bidang organisasi sebagai berikut:

Sebagai anggota Rayon Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung tahun 2014.

Bandar Lampung, Desember 2018

Hormat Saya,

Mizarwan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) program studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI). Shalawat serta salam senantiasa penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam segala urusan, pemimpin revolusioner dunia menuju cahaya kemenangan dunia dan akhirat, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Adapun judul skripsi ini adalah **“KEDUDUKAN ANAK TERTUA LAKI-LAKI DALAM ADAT LAMPUNG SAIBATIN DI KABUPATEN PESISIR BARAT ”**.

Keberhasilan ini tentu saja tidak dapat terwujud tanpa bimbingan, dukungan dan bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dengan rasa hormat yang paling dalam penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M. Si. Selaku Dekan Fakultas dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung yang telah memimpin fakultas ini dengan baik.
2. Ibu Hj. Rini Setiawati, M. Sos.I sebagai ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam

3. Bapak Dr. Hasan Mukmin, M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Badaruddin, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini. Yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingannya demi selesainya skripsi ini..
4. Para Dosen serta segenap Staff Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengetahuan dan segenap bantuan selama proses menyelesaikan studi.
5. Seluruh sahabat seperjuangan jurusan Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) khususnya angkatan 2013 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk kebersamaan yang terjalin selama ini. sukses untuk kita semua.
6. Segenap pihak yang belum disebutkan di atas yang juga telah memberikan sumbangsih kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal dan menjadi catatan amal ibadah disisi Allah. Akhirnya penulis menyadari dengan kemampuan dan pengetahuan yang terbatas, banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan skripsi ini maka, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, September 2018

Penulis,

Mizarwan

NPM. 1341040108

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan judul	1
B. Alasan Memilih Judul	4
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
F. Metodologi Penelitian	10
G. Metode Pengumpulan Data	13
H. Kajian Pustaka	17

BAB II KEDUDUKAN ANAK TERTUA LAKI-LAKI DALAM ADAT LAMPUNG SAIBATIN DI KABUPATEN PESISIR BARAT

A. Kedudukan Anak Tertua Laki-Laki	20
1. Pengertian kedudukan Anak Tertua Laki-Laki	20
2. Kedudukan Anak Tertua Laki-Laki Menurut Hukum Islam ...	26
3. Kedudukan Anak Tertua Laki-Laki Menurut Hukum Adat ...	28
B. Pembinaan Keluarga	30
1. Pengertian pembinaan keluarga	30
2. Pengertian pembinaan keluarga menurut perspektik Islam ...	31
3. Struktur keluarga	32
C. Adat Lampung Pesisir Saibatin	33
1. Pengertian Umum Adat	33
2. System Hukum Adat	35
3. System Kekeluargaan dalam Hukum Adat	37
4. Struktur kekerabatan Masyarakat Lampung secara umum.....	40

BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

A. Gambaran Umum Kabupaten Pesisir Barat	44
1. Gambaran umum Pesisir Barat.....	44
2. Kondisi topografi Pesisir Barat	53
3. Kondisi iklim Pesisir Barat	54
4. Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Barat	55
5. Potensi Sumber Daya Alam	56
B. Kedudukan Anak tertua laki-laki dalam Adat Lampung Saibatin.	57
BAB IV KEDUDUKAN ANAK TERTUA LAKI-LAKI DALAM ADAT LAMPUNG SAIBATIN KABUPATEN PESISIR BARAT	
A. Sebagai Ahli Waris.....	65
B. Sebagai Pemimpin Keluarga.....	66
C. Sebagai Penganyom Keluarga	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Sampel
Lampiran 2	Pedoman Pengumpulan Data
Lampiran 3	Kartu Konsultasi Skripsi
Lampiran 4	Surat Keputusan Judul Skripsi
Lampiran 5	Surat Rekomendasi Penelitian/Survey
Lampiran 6	Surat Keterangan Bukti Penelitian
Lampiran 7	Kartu Hadir Munaqosah



DAFTAR TABEL

Table 1	Hasil pengamatan tentang pandangan terhadap peranan kakak tertua laki-laki pada masyarakat Kabupaten Pesisir Barat
Table 2	Status jumlah penduduk berdasarkan kecamatan
Table 3	Jenis dan alat produksi budidaya ikan laut dan payau



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas bagi para pembaca agar tidak terjadi kesalah pahaman dari pembahasan yang di maksud dalam skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan arti yang terdapat pada judul skripsi. Judul skripsi ini adalah **“KEDUDUKAN ANAK TERTUA LAKI-LAKI DALAM ADAT LAMPUNG SAIBATIN DI KABUPATEN PESISIR BARAT”**

Maka disini penulis perlu menjelaskan arti yang ada di dalam penegasan judul sebagai berikut.

Kedudukan berarti status, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (social status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan kewajibannya.

Menurut Ralph Linton kedudukan di bedakan menjadi dua macam, yaitu :

- a. Ascribed Status, kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan seseorang, kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Misalnya, kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan pula, seorang anak dari kasta Brahmana juga akan memperoleh kedudukan

yang demikian. Kebanyakan ascribed status dijumpai pada masyarakat dengan sistem pelapisan sosial yang tertutup, seperti sistem pelapisan berdasarkan perbedaan ras. Meskipun demikian bukan berarti dalam masyarakat dengan sistem pelapisan terbuka tidak ditemui dengan adanya ascribed status. Kita lihat kedudukan laki-laki dalam suatu keluarga akan berbeda dengan kedudukan istri dan anak-anaknya, karena pada umumnya laki-laki (ayah) akan menjadi kepala keluarga.

- b. Achieved Status, yaitu kedudukan yang dicapai atau diperjuangkan oleh seseorang dengan usaha-usaha yang dengan sengaja dilakukan, bukan diperoleh karena kelahiran. Kedudukan ini bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung dari kemampuan dari masing-masing orang dalam mengejar dan mencapai tujuan-tujuannya. Misalnya setiap orang bisa menjadi Dokter, Guru, Hakim dan sebagainya, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dengan demikian tergantung pada masing-masing orang, apakah sanggup dan mampu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan atau tidak.¹

Adapun anak tertua laki-laki yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak laki-laki pertama meskipun dia anak terakhir. Menurut silsilah dalam adat Lampung saibatin anak tertua laki-laki disebut anak tuha yang dipanggil “Udo atau Udo dang” panggilan kalau dari keturunan Raja. Dalam Adat Lampung Saibatin anak laki-laki merupakan harapan untuk melanjutkan silsilah keturunan.

¹ . Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1989, h. 79

“Istilah adat berasal dari kata bahasa Arab adalah “Adah” yang artinya kebiasaan yang normatif yang telah berwujud, aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat dan di pertahankan masyarakat”.² Sedangkan Istilah adat Menurut Soekanto dalam buku karangannya memberikan pengertian mengenai “ Adat yaitu perilaku budaya yang telah membaku dari suatu kelompok masyarakat “. ³

Adat juga memiliki arti lain ialah ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat, kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat “atau bagian masyarakat” yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya. Dalam pendapat di atas disimpulkan bahwa masyarakat adat adalah suatu perilaku atau pedoman hidup masyarakat yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari dalam suatu masyarakat dan suatu kebiasaan yang terwujud atau di terapkan pada manusia atau pada tingkah laku manusia sehari-hari.

Berdasarkan uraian mengenai penegasan judul skripsi ini adalah suatu studi tentang Kedudukan Anak Tertua Laki-Laki Dalam Adat Lampung Saibatin di Kabupaten Pesisir Barat, dengan tujuan untuk mengetahui apa kedudukan anak tertua laki-laki dalam adat Lampung Saibatin di kabupaten pesisir barat. Selain itu juga untuk melestarikan dan memahami adat budaya lampung khususnya adat saibatin.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi pertimbangan dan alasan penulis dalam memilih judul tersebut adalah :

²Hadikusuma, Hilma. *Pengantar Ilmu Adat Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 16

³ Soerjono, Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: PT.Raja grafindo Persada, 2003), h.148

Dalam kehidupan masyarakat Lampung saibatin khususnya pada kabupaten Pesisir Barat, anak tertua laki-laki dalam adat lampung saibatin memiliki kedudukan dalam adat dan keluarga. Maka dari itu penulis menganggap perlu diadakan penelitian terhadap Kedudukan Anak Tertua Laki-Laki Dalam Adat Lampung Saibatin di Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini diharapkan dapat dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan mengingat data yang tersedia, lokasi penelitian yang bisa dijangkau oleh penulis dan waktu yang tersedia.

C. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan kebudayaan yang hidup tersebar disekitar 17.000 gugusan pulau-pulau, mulai dari Sabang di sebelah Barat, sampai ke kota Merauke di sebelah Timur. Salah satu suku bangsa Indonesia adalah Lampung. Daerah Lampung berubah menjadi Propinsi setelah memisahkan diri dari Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 18 Maret 1964 berdasarkan UU No. 14 tahun 1964 Daerah Lampung merupakan daerah yang dikenal dengan sebutan "Sang Bumi Ruwa Jurai" atau "Rumah Tangga Dua (asal) Keturunan yaitu penduduk pendatang dan penduduk Lampung asli.⁴ Penduduk pendatang sebagian besar berasal dari Jawa dan Bali. Secara garis besar, suku bangsa Lampung dapat dibedakan menjadi dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat Lampung yang beradat Pepadun dan masyarakat Lampung yang

Buku Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan daerah tingkat I Lampung , Bab : II pasal 3. h. 11.⁴

beradat Peminggir atau Saibatin. Dalam konteks hubungan bermasyarakat tersebut kita mengenal adanya sistem nilai yang konon merupakan sebuah kesepakatan ataupun consensus yang dijadikan pedoman atau pegangan hidup dalam bersosialisasi, namun seiring dengan perkembangan globalisasi dan modernisasi yang semakin pesat, tata nilai dalam masyarakat tersebut berangsur-angsur ikut juga bergeser.

Peran-peran sosial yang seharusnya dijalankan oleh seseorang akan menjadi tidak mutlak akibat pergeseran tata nilai yang terjadi di masyarakat, masyarakat semakin tidak menghendaki sebuah kesadaran kolektif dalam membangun kebersamaan dalam sosialisasi, akan tetapi skema fungsi sosial yang berkembang dewasa ini lebih kepada bagaimana kita mempunyai (*reward*) ataupun nilai pengganti dari sebuah peran yang seharusnya kita jalankan.

Kita dapat melihat kenyataan di masyarakat sekarang, pudarnya sistem nilai-nilai sangat dipengaruhi dengan pengaruh mekanisme perubahan dalam masyarakat juga. Pergeseran tata nilai bukanlah merupakan persoalan yang baru. Persolan ini sudah berakar dan sulit untuk dipecahkan, sebab ketika membicarakan solusi maka tidak ada pilihan lain kecuali memperbaiki kondisi tata cara kita dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahaman terhadap aturan nilai-nilai dalam kehidupan merupakan aset bagi masyarakat, pemahaman tersebut perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki pengetahuan, moral, dan juga budi pekerti yang baik dan selaras dengan nilai-nilai yang ada. Sehingga tidak terjadi

suatu kesenjangan sosial antar masyarakat baik itu sesama masyarakat asli maupun antar masyarakat pendatang.⁵

Apabila nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tersebut tidak menyentuh kehidupan nyata dalam masyarakat, tidak dirasakan lagi wujudnya dalam kehidupan sehari-hari, maka lambat laun kehidupan akan kabur dan kesetiaan kepada aturan-aturan nilai yang ada ditengah masyarakat yang terkandung dalam Pancasila akan luntur seperti kurang rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama makhluk sosial.

Masyarakat Lampung merupakan masyarakat yang mempunyai adat, tradisi dan kebudayaan yang berbeda-beda. Suku Lampung terbagi menjadi dua bagian yaitu Lampung Pepadun ada juga Lampung Saibatin (pesisir). Lampung Saibatin juga disebut Lampung pesisir karena sebagian besar masyarakatnya berdominasi di pantai pesisir. Lampung pesisir mempunyai tata nilai tersendiri dalam menjalankan kehidupannya. Dengan berbagai adat dan kebiasaan menunjukkan bahwa masyarakat Lampung Pesisir sangat berintraksi terhadap lingkungannya.

Seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan masyarakat pesisir sekarang ini terlihat jelas semakin renggangnya solidaritas dan jalinan ikatan sosial yang ada pada masyarakat pesisir, sebaliknya yang tampak kemudian adalah menguatnya gaya hidup hedonis dan individualistik, khususnya di kalangan generasi muda. Lemahnya ikatan solidaritas ini dapat dilihat dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

⁵Hadikusuma, Hilma. *Pengantar ilmu adat Indonesia*. (Bandung: Mandar maju, 2013). h. 34

Berdasarkan wawancara kepada tokoh adat, penulis dapat menyimpulkan bahwa di Kabupaten Pesisir Barat sudah mengalami perubahan terhadap tata nilai yang ada. Yang dulunya masyarakat mengenal dengan nilai-nilai lokal serta dapat menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Sedangkan sekarang masyarakat sudah memulai dengan hidup yang individual mengenai hubungan pergaulan dalam keluarga dan masyarakat, baik antara orang tua dengan anak maupun antar anggota masyarakat. Bahkan juga yang terkait dengan persoalan-persoalan hukum adat.

Hal ini dipertegas lagi oleh pernyataan salah satu kepala adat di Kabupaten Pesisir Barat pada hari Jum'at, 8 Juni 2018 menurut beliau kehidupan masyarakat lampung saibatin mengalami perubahan tatacara nilai dalam kehidupan, baik berupa kebersamaan dan kerukunan serta penggunaan kedudukan dalam adat.⁶

Hasil wawancara ini diperkuat dengan hasil pengamatan pada masyarakat Kabupaten Pesisir Barat mengenai tata nilai sebagai berikut:

Tabel I : Hasil Pengamatan Tentang Tata Nilai Pada Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat

No	Aspek yang diamati	Ukuran		
		kuat	Sedang	Lemah
1	Penggunaan Simbol2 Adat budaya	√		
2	Sikap toleransi		√	
3	Rasa kebersamaan dan kerukunan			√
4	Penggunaan kedudukan dalam Adat			√

Sumber Data: observasi lapangan penelitian 9 juni 2018

⁶ Bapak Ahmad Darsan S.Pd Raja penimbang Adat Saibatin pekon Tanjung Jati Kec Lemong Kab Pesisir Barat, *Wawancara* 08 Juni 2018

Dalam tabel di atas menunjukkan adanya perubahan sikap terhadap rasa kebersamaan dan kerukunan serta kurangnya kesadaran dalam penggunaan kedudukan adat.

Masyarakat adat lampung saibatin termasuk dalam golongan masyarakat adat yang bersifat patrilineal. Masyarakat adat patrilineal memiliki konsep dasar kekerabatan yang berdasarkan pada garis keturunan laki-laki. Dalam adat patrilineal keturunan dari bapak (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak. Hal itu secara serta-merta akan mempengaruhi sistem pewarisan adat berupa penerusan harta waris kepada anak laki-laki, khususnya anak laki-laki tertua.

Dalam adat Lampung saibatin khususnya pada masyarakat pesisir barat kedudukan anak tertua laki-laki akan memegang peran penting di kehidupan keluarganya. Berdasarkan hukum adat yang masih dipegang masyarakat lampung saibatin tercermin dalam sistem dan perkawinan adat serta upacara-upacara adat Saibatin yang berlaku atas dasar musyawarah dan mufakat punyimbang adat, dimana anak laki-laki tertua dari keturunan punyimbang memegang kekuasaan adat. Kedudukan anak tertua laki-laki berperan penting dalam kehidupan keluarga dan dalam keadatan, walaupun kemajuan zaman yang semakin moden.

Laki-laki sebagai penerus silsilah keturunan menjadi sentral pokok dalam keluarga adat Lampung saibatin. Bila dalam keluarga Lampung belum mempunyai keturunan laki-laki, maka keluarga tersebut masih merasakan ketimpangan-ketimpangan. Terutama dalam hukum adat misalnya, dalam kekeluargaan, perkawinan dan pewarisan. Perempuan bukannya tidak

mempunyai peran, tetapi tidak dituntut untuk melakukan hal-hal tersebut, dalam masyarakat Adat Lampung sendiri ada jalan keluarnya yaitu dengan cara mengadakan perkawinan *Jeng Mirul* ; Perkawinan *Tegak Tegi* (Menjadikan suami dari anak perempuan sebagai penerus adat dan warisan) bahkan kadang-kadang keluarga akan memberikan atau menganjurkan pada anak laki-lakinya untuk menikah lagi dengan kerabat dari istri mudanya akan mendapatkan keturunan laki-laki.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang kedudukan anak tertua laki-laki dalam adat Lampung saibatin di Kabupaten Pesisir Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu : Apa Kedudukan Anak Tertua Laki-Laki Dalam Adat Lampung Saibatin di Kabupaten Pesisir Barat?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Apa Kedudukan Anak tertua laki-laki dalam adat Lampung Saibatin di Kabupaten Pesisir Barat.
2. Sebagai masukan bagi pemerintah agar dinas pendidikan dan kebudayaan hendaknya dapat melestarikan adat budaya lampung khususnya adat saibatin.
3. Sebagai calon serjana sosial, hasil penelitian ini berguna sebagai suplemen bahan kajian dan menambah wawasan tentang aturan kehidupan bermasyarakat.
- 4.

F. Metodologi Penelitian

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan memperoleh hasil data dan informasi yang valid maka dalam tulisan ini penulis akan menguraikan metode penelitian yang digunakan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenisnya maka yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini dilakukan secara sistematis terhadap data yang ada di lapangan, sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan dengan cara menggunakan metode alamiah.⁷

Disini peneliti melakukan jenis penelitian lapangan (*field research*) sesuai kondisi yang ada mengenai tentang peranan kakak tertua laki-laki dalam Adat Lampung analisa pada Kabupaten Pesisir Barat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.⁸ salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Sifat kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan

⁷ Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan praktek (Jakarta: PT rineka cipta, 2010), h. 173

⁸ Muhammad Musa, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Fajar Agung, 1998), h. 8

perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang di kaji dari sudut pandang yang utuh, *komprehensif* dan *holistik*⁹.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah seluruh unit analisis objek penelitian¹⁰. Menurut Prof. Dr. Sugiyono, Populasi adalah sebagian wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹¹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 50 orang anak tua laki-laki (anak tuha) yang memiliki garis keturunan raja pada masyarakat Kabupaten Pesisir Barat.

b. Sampel

Sampel adalah cara sebagian (wakil) dari populasi itu, populasi itu misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah tertentu dan sebagainya.¹² Menurut Suharsimi Arikunto sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat mewakili populasinya.¹³ Adapun teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan yaitu teknik *nonprobability*

⁹ *Ibid*, h. 19.

¹⁰ Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : PT. Remaja Rosdarya, 1995), h. 57

¹¹ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Alfabeta : Jl. Gegerkalong Hilir Bandung, 2015), h. 215.

¹² *Ibid*, h. 215.

¹³ Suharsimi Arikunto *Op. Cit.* h. 104.

sampling atau non random yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, *sampling sistematis, kouta, aksidental, purposive, jenuh dan snowball*.¹⁴

Kemudian jenis teknik sampling yang penulis gunakan yaitu *purposive sampling*. Dalam *purposive sampling*, pemilihan sekelompok subjek di dasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan diatas kriteria untuk menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 25 orang yang sudah berkeluarga. Agar memudahkan dalam kegiatan penelitian ini, maka peneliti mengelompokkan populasi sampel kakak tertua dan tokoh adat masyarakat pada Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan ciri-ciri tertentu yaitu :

1. Anak laki-laki tertua (anak tuha) yang memilki kedudukan Adat pada masyarakat kabupaten pesisir Barat
2. Anak Laki-laki tertua (anak tuha) yang sudah berumah tangga
3. Penyimbang adat sai batin Kabuaten Pesisir Barat
4. Berusia 30 sampai 45 tahun

Berdasarkan kriteria tersebut maka sample dalam penelitian ini berjumlah 5 Orang.

¹⁴ *Ibid h. 218.*

G. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pencatatan data yang digunakan penelitian dalam penggunaan metode-metode pengumpulan data disini adalah untuk memperoleh data-data yang akurat dari suatu objek yang diteliti tersebut nantinya diharapkan dapat membantu penulis dalam mencari data yang dibutuhkan untuk penelitian. untuk mempermudah dalam mengambil data lapangan, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana panneliti atau kolabolatornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengar, merasakan, yang kemudian dicatat sesubjektif mungkin ¹⁵. Menurut Wiratna Sujarweni *Observasi* merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran ril suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil *observasi* berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu. Bungin mengemukakan beberapa bentuk

¹⁵ W.golo, metedologi penelitian (Jakarta: PT grasendo 2010), h. 116.

observasi yaitu *observasi* partisipasi, *observasi* tidak terstruktur, *observasi* kelompok.¹⁶

Dalam pelaksanaannya, observasi yang dipakai dalam penelitian ini, adalah menggunakan observasi non-partisipasi. Observasi non partisipasi (*Non Participant Observation*) yaitu observer tidak diambil bagian secara langsung didalam situasi kehidupan yang di observasi, tetapi dapat dikatakan sebagai penonton, jadi tidak sebagai pemain, pengamat tidak sepenuhnya mengikuti kegiatan dilakukan tetapi peneliti berada dilokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti hanya sebagai pengamat dan pencatat terhadap semua gejala yang berkaitan proses dan tahap pelaksanaan layanan bimbingan karir yang dilakukan.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan responden merupakan pola media yang melengkapai kata-kata secara verbal¹⁷. Disini peneliti menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*), dimana peneliti terlibat langsung secara mendalam dengan kehidupan subjek yang diteliti dan tanya jawab yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman yang disiapkan

¹⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta : 2014, h 32.

¹⁷*Ibid*, h. 119.

sebelumnya serta dilakukan berkali-kali¹⁸. wawancara ini dilakukan kepada masyarakat Kabupaten Pesisir Barat.

3. Metode Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber informasi yang bukan manusia antara lain adalah dokumen, foto, dan bahan statistik. Menurut Sugiyono Dokumen merupakan catatan peristiwa yang kian, telah lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya menuental dari seseorang lainnya. dokumen yang berebentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, kriteria, biografi, peraturan, kebijakan dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, film, video, CD, DVD, cassette, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, karya lukis, patung, naskah, tulisan, prasasti dan lain sebagainya.¹⁹

Penulis menggunakan metode dokumentasi ini merupakan sebuah metode penunjang karena untuk melengkapi data-data dari observasi dan interview. Dokumen dapat dibedakan menjadi *dokumen primer*, jika dokumen ini di tulis oleh orang yang langsung mengalami suatu pristiwa; dan *dokumen skunder*, jika pristiwa di laporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis orang ini.²⁰ Penulis akan menggunakan *dokumen skunder* untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi tertulis secara obyektif dan konkrit, dokumen tersebut berupa catatan resmi sesuai dengan keperluan peneliti.

¹⁸ *Ibid*, h. 17.

¹⁹ Kaelan, *Op.Cit.* h. 126

²⁰ Irwan Soehartono, *Op.Cit.* h. 70

4. Teknik Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data-data yang dibutuhkan, kemudahan penulis menganalisisnya dengan menggunakan analisa data kualitatif, yaitu : suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang - orang dan perilaku yang dapat dimengerti²¹. Data deskriptif yang disajikan dengan menggambarkan apa adanya sesuai dengan data penelitian, menggambarkan permasalahan dan mencari jawaban atas permasalahan tersebut, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir induktif. Analisa kualitatif ini diperoleh dengan cara data yang ada dari lapangan dan merinci menjadi sebuah kalimat - kalimat, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas. Dalam proses analisa data ini penulis dapat menarik kesimpulan sesuai dengan sudut kepentingan dalam pembahasan skripsi ini dan akhirnya ditarik kesimpulan secara menyeluruh dari keseluruhan pembahasan disertai dengan saran - saran dan data - data yang diperoleh dilapangan yaitu mengenai peranan kaka tertua laki-laki dalam Adat Lampung.

H. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa judul skripsi mahasiswa atau mahasiswi sebelumnya yang oleh penulis dijadikan sebagai tinjauan pustaka.

²¹ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung : 2001, h. 3, dikutip skripsi Miskham, h. 13.

Namun perlu ditegaskan perbedaan antara masing-masing judul dan masalah yang dibahas, antara lain :

1. Wita Werlina, Jurusan Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan 2012, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung. Judul skripsi Analisis Kedudukan Anak Laki-Laki dan Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris Dalam Adat Lampung *Sai Batin* di Karbang Tinggi Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Provinsi Lampung.
2. Melya Wati, Jurusan Pendidikan IPS Program pendidikan stady PPKn 2012, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bandar Lampung dengan Judul “Tinjauan Tentang Pentingnya Kedudukan Anak Laki-Laki Pada Masyarakat Adat Lampung Sai Batin Marga Way Napal di Desa Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Lampung Barat.

Dari kedua skripsi di atas, yang membedakan dengan skripsi penulis adalah mengkaji tentang kedudukan anak tertua laki-laki dalam adat lampung saibatin di kabupaten pesisir barat. Dimana diatas dijelaskan masing-masing skripsi penulis menemukan pembeda antara skripsi penulis dengan yang terdahulu.

BAB II

KEDUDUKAN ANAK TERTUA LAKI-LAKI DALAM ADAT LAMPUNGSAIBATIN DI KABUPATEN PESISIR BARAT

A. Kedudukan Anak Tertua Laki-laki

1. Pengertian Kedudukan Anak Tertua Laki-laki

Anak laki-laki ditinjau dari hukum Islam ialah sebagai pemimpin atau imam bagi keluarga maupun masyarakat. Dalam hal ini anak laki-laki tertua berkedudukan sebagai anak yang bertanggung jawab meneruskan keturunan menggantikan kedudukan ayahnya sebagai kepala kerabat keturunan ayahnya. Ia juga berhak untuk mengelola dan memelihara harta warisan dengan peruntukan menghidupi seluruh keluarganya.

Pada dasarnya orang Lampung Saibatin berdasarkan garis keturunan lurus dari atas pemekonan (menurut keturunan jurai lurus). Hanya anak laki-laki tertua dari keturunan yang paling tua yang bisa menjadi raja (pemimpin). Saibatin dan tanggung jawabannya terhadap adik-adiknya dan tidak berlaku bagi saudara-saudara yang lebih muda untuk menjadi raja atau punyimbang. Apabila dari anak tertua laki-laki tersebut tidak mempunyai anak laki-laki maka yang akan berhak menggantikan dia (raja) adalah adik-adik dari raja atau punyimbangan tersebut.

Adapun kedudukan anak tertua laki-laki (anak tuha) dalam adat Lampung Saibatin adalah sebagai berikut:

a. Sebagai ahli waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang sudah meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.

Adapun pengertian hukum waris menurut Ali Afandi menyatakan hukum waris adalah “Suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan”.

Menurut Wirjono. 1976, "warisan" ialah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup".²²

Berdasarkan pendapat diatas menggambarkan bahwa hukum waris adalah penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang memuat ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud dari pewaris kepada para warisnya yang dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Pengaturan kewarisan menurut masyarakat adat Lampung didasarkan pada sistem kewarisan mayoritas laki-laki, artinya anak laki-laki tertua pada saat si pewaris

²² Projodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Sumur, Bandung. 1976

meninggal dunia berhak penuh menguasai seluruh harta warisan orang tuanya. Pengertian berhak penuh disini adalah dalam hal pengaturan dari hasil harta warisan orang tuanya.

Dikatakan demikian karena anak laki-laki tertua mempunyai tanggung jawab penuh untuk memelihara, membina dan mempertahankan kehidupan yang layak dari seluruh keluarga, yaitu adik-adik dan orang tua yang hidup, misalnya terhadap adik-adik yang masih belum dapat berdiri sendiri seperti belum berkeluarga, masih sekolah dan sebagainya. Harta pusaka keluarga tetap dipegang dan dikuasai oleh anak laki-laki tertua. Kemungkinan bagi anak laki-laki lain akan mendapat harta warisan akan tergantung dari banyaknya harta peninggalan orang tuanya. Dalam masyarakat Lampung anak yang berhak mendapat waris dibedakan menjadi :

1. Anak Kandung

Anak kandung anak jasad yang dilahirkan dari suatu hubungan perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum adat maupun hukum negara ataupun ketentuan agama Islam. Dari sudut status dapat dibedakan antara anak kandung laki-laki dan perempuan biasa dengan anak laki-laki dan perempuan adat. Anak kandung adat adalah anak kandung yang sudah dilakukan upacara adat oleh orang tuanya yang disebut dengan upacara selamatan. Upacara ini dimaksudkan sebagai media pengumuman dan penegasan kepada anggota masyarakat adat bahwa suatu keluarga sudah bertambah

anggotanya, disamping itu juga memenuhi perintah petunjuk agama islam. Sedangkan anak yang belum dilakukan upacara selamatan untuk tetap sebagai anak kandung adat. Karena dalam aturan adat Saibatin suatu keturunan yang sedarah tetap sebagai anak kandung adat terutama anak laki-laki tertua. Namun akan lebih baik jika dilakukannya upacara selamatan maka seolah-olah pengawasan terhadap anak kandung adat tersebut dalam perbuatan dan tingkah laku sehari-hari telah menjadi tanggung jawab masyarakat adat.

2. Anak Angkat

Anak Angkat adalah seorang anak yang bukan hasil keturunan dari kedua orang tua suami istri namun dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak keturunannya sendiri. Anak angkat tersebut akan diresmikan atau akan ditetapkan sebagai anak orang tua yang mengangkatnya dengan suatu upacara adat tertentu. Pengangkatan anak atau adopsi dalam masyarakat Lampung dapat dilakukan karena suatu keluarga tidak mempunyai anak sama sekali, atau karena suatu keluarga hanya mempunyai anak perempuan saja tidak mempunyai anak laki-laki. Seorang anak angkat dengan status anak angkat adat bisa menjadi pelanjut keturunan dari orangtua angkatnya.

3. Anak Pungut

Anak pungut adalah anak yang bukan hasil keturunan dari perkawinan kedua orang tua (suami istri) yang dirawat serta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak turunannya sendiri. Anak pungut hampir sama dengan anak angkat namun pada anak pungut pelaksanaannya tanpa melalui suatu upacara adat sehingga ia tidak mempunyai status adat, karena ia akan menjadi tenaga pekerja dan membantu kegiatan sehari-hari dalam suatu keluarga adat tersebut. Oleh karena itu anak pungut tidak mempunyai hak dalam mewarisi.

4. Anak diluar perkawinan

Anak diluar perkawinan adalah anak yang dilahirkan dari suatu hubungan perkawinan yang tidak sah atau perkawinan yang terjadi setelah ibunya hamil lebih dahulu. Anak di luar perkawinan ini tetap mempunyai hak waris dari orang tua laki-lakinya karena anak ini adalah anak keturunan sedarah, jadi anak ini tetap bisa menjadi pemimpin dalam suatu masyarakat adat. Anak yang demikian ini pada masyarakat adat Lampung adalah anak anak yang hina namun tetap dihormati oleh masyarakat biasa karena anak ini adalah anak kandung adat.

b. Sebagai Pemimpin Keluarga

Sistim kekerabatan masyarakat Lampung berporos pada prinsip keturunan menurut garis bapak (patrilineal) dimana kedudukan anak

laki-laki tertua (anak puyimbang) memegang kekuasaan sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, kerabat dan marga atau masyarakat adatnya. Anak puyimbang adalah puyimbang (pemimpin keturunan) yang berhak dan berkewajiban mengatur hak-hak dan kewajiban adik-adiknya yang pria maupun wanita yang belum menikah dan mengikuti kedudukan suami dalam batas-batas kedudukannya sebagai puyimbang adat dan puyimbang marga adat kekerabatannya.

Terdapat perbedaan kedudukan hak dan kewajiban antara kerabat pria (ayah) dan kerabat wanita (ibu). Yang berfungsi sebagai pengatur adalah pihak laki-laki dan pihak perempuan hanya bersifat membantu. Misalnya dalam adat perkawinan, maka yang berfungsi dan berperan adalah pihak pria (saudara adik beradik pria) sedangkan pihak wanita (termasuk suaminya) hanyalah bersifat membantu dalam rangka menghormati kedudukan ipar ataupun mertua. Demikian halnya dalam fungsi dan peranannya dibidang adat yang menyangkut adat kekerabatan.

c. Sebagai Penganyom Keluarga

Sistim kekerabatan Lampung yang berpokok pangkal pada satu rumah besar (Lamban balak dan Lamban gedung) anak puyimbang tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin keluarga tetapi juga berfungsi sebagai pengayom keluarga. Pengayom keluarga tidak hanya memimpin keluarga dalam adat kekerabatan saja tetapi mencakup

keseluruhan fungsi sebagai anak punyimbang adat dan punyimbang marga yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap keluarga dan marga adatnya. Misalnya saja sebagai pengganti ayah, anak punyimbang harus membesarkan adik-adiknya, mendidik dan membiayai sekolah adik-adiknya, menanggung beban pengeluaran kehidupan sehari-hari (menafkahi ibu serta adik-adiknya) serta bertanggung jawab membiayai pernikahan adik-adiknya.

2. Kedudukan Anak Tertua Laki-Laki Menurut Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, As sunnah atau Al Hadis dimana hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia sehari-hari dalam hubungan individu dengan masyarakat dan hubungan manusia dengan Allah. Adapun kedudukan anak laki-laki ditinjau dari hukum Islam ialah sebagai pemimpin atau imam bagi keluarga maupun masyarakat.

Sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 34 Allah Swt berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّمَّا نَفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي إِتَّخَفُونَ نُسُوءَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأُخْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ طَعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan

sebagian dari harta mereka.sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.²³

Adapun kaitannya dengan ayat tersebut, “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaati mu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.(Al-Qur’an surat an-nisa ayat 34).

Seperti yang diriwayatkan dalam pernikahan Nabi Muhammad dan istrinya Siti Khadijah. Dimana Nabi Muhammad adalah seorang laki-laki dari kalangan keluarga tidak mampu atau miskin sedangkan Siti Khadijah istrinya adalah seorang yang kaya raya. Namun, karena Nabi Muhammad adalah suaminya maka Siti Khadijah harus nurut perintah suaminya

²³Al-Quran dan Terjemahan juz 1-30 (Edisi baru) Departemen Agama RI, (Tri Karya Surabaya), Qs.An-Nissa: 34, h. 176

karena suami adalah pemimpin dalam keluarga dan tidak bisa digantikan oleh perempuan atau istrinya walaupun dia seorang yang kaya raya sekalipun.

3. Kedudukan Anak Tertua Laki-Laki Menurut Hukum Adat

Pengertian hukum adat menurut Van Vollenhoven diterjemahkan M.R.A. Soehardi menyatakan bahwa, hukum adat adalah “keseluruhan tingkah laku positif di satu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu : “hukum”) dan pihak lain dalam keadaan yang tidak dikondifikasikan (oleh karena itu : “adat”). (Van Vollenhoven, 1981 : 5) Dalam teori Snouck Hurgronje yang sangat terkenal dengan teori resepsi.²⁴

Menurut pendapatnya walaupun diterima dalam teori, hukum Islam seringkali dilanggar dalam prakteknya. Dalam masyarakat Islam hukum Islam tidak berlaku yang berlaku adalah hukum adat. Di dalam hukum adat memang telah masuk unsur-unsur hukum Islam, tetapi hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat adat, bukan lagi hukum Islam karena telah menjadi hukum adat. Oleh karena itu, menurut Snouck Hurgronje “hukum Islam tidak perlu dikodifikasikan karena selain pengkodifikasian hukum itu merupakan sesuatu yang bid’ah (pembaruan agama Islam, tanpa berpedoman pada Alquran dan Al-hadis), juga akan menghambat berlakunya hukum Islam”.

Adapun menurut hukum adat lampung laki-laki adalah sebagai penerus keturunan yang sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam

²⁴Van Vollenhoven, 1981 : 5

hal ini, anak laki-laki dituntut untuk bisa mengatur keluarga besar dan para kerabatnya. Dikarenakan masyarakat lampung mayoritas agama Islam jadi laki-laki adalah pemimpin bagi keluarga dan pemimpin bagi marga adatnya. Dalam hukum adat lampung saibatin termasuk kedalam hukum adat yang tidak tertulis. Seperti yang disebutkan oleh Soekanto, Soepomo menyatakan bahwa hukum adat adalah “ hukum yang tidak tertulis dalam peraturan-peraturan legislatif (unstatutory law), meliputi peraturan hidup yang meskipun tidak dicitakan oleh yang berwajib, tetapi harus dihormati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

B. Pembinaan Keluarga

1. Pengertian Pembinaan keluarga

Berdasarkan *kamus besar bahasa Indonesia* pembinaan adalah suatu proses, cara, perbuatan membina atau pembaharuan, penyempurnaan atau usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.²⁵ Sedangkan Keluarga adalah merupakan kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah group yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan perempuan, hubungan sedikit banyak berlangsung lama

²⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 193.

untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak yang belum dewasa. Satuan ini mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama, dimana saja dalam satuan manusia.²⁶

Keluarga merupakan institut kecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara anggotanya.²⁷ Arti kata lain dari keluarga ialah yang berasal dari kata “keluarga” dengan memperoleh dari awalan “ke” dan akhiran “an” berarti yang perihal yang bersifat atau ciri keluarga. Dapat juga diartikan hal yang berkaitan dengan keluarga atau hubungan anggota di dalam suatu keluarga.²⁸ Pengertian keluarga dapat ditinjau dari dimensi hubungan darah dan hubungan sosial. Keluarga dalam dimensi hubungan darah merupakan suatu kesatuan sosial yang diikat dengan hubungan darah lainnya.

Berdasarkan dimensi hubungan darah ini, keluarga dapat dibedakan menjadi keluarga besar dan keluarga inti. Sedangkan dalam dimensi hubungan sosial, keluarga merupakan kesatuan sosial yang diikat oleh adanya hubungan antar interaksi yang mempengaruhi antara satu dengan yang lain.

1. Pengertian Pembinaan Keluarga Menurut Perspektif Islam

²⁶ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 221.

²⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 37

²⁸ Muhammad Amin Summan, *Hukum keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2005), hlm. 15.

Islam merupakan agama yang fitrah, agama yang selalu sesuai dengan tabiat dan dorongan batin manusia. Islam dapat memenuhi dorongan-dorongan batin manusia dengan menempatkan dorongan-dorongan tersebut pada garis Syari'at Islam. Dorongan batin untuk mengadakan kontak antar jenis laki-laki dan perempuan diatur Syari'at perkawinan.²⁹

Membina sebuah *mahligai* rumah tangga atau hidup keluarga merupakan perintah agama bagi setiap muslim dan muslimah. Melalui rumah tangga yang Islami, diharapkan akan membentuk komunitas kecil di dalam masyarakat Islam. Bila setiap keluarga dibina dan dididik dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, maka pada akhirnya akan membentuk masyarakat yang Islamipula. Keluarga atau rumah tangga yang Islami, dibangun atas iman dan takwa sebagai pondasinya, Syari'at atau aturan Islam sebagai bentuk bangunannya, akhlak dan budi pekerti mulia sebagai hiasannya. Rumah tangga seperti inilah yang akan tetap kokoh dan tidak akan mudah rapuh dalam menghadapi budaia kehidupan dasyat sekalipun.

2. Struktur keluarga

Kebutuhan dalam struktur keluarga yang dimaksud dengan kebutuhan keluarga ialah hadirnya ayah, ibu dan anak dalam satu keluarga. Sehingga kebutuhan keluarga, interaksi antara anggota keluarga yaitu berupa hubungan harmonis keluarga memegang peranan penting dalam perkembangan sosial

²⁹Husein Muhammad Yusuf, *Keluarga Muslim dan Tanggungannya*, Cet 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) hlm 69.

anak.³⁰ Darisegekeberadaananggotakeluargadapatdibedakanmenjadidua,yaitukeluargaintidankeluargabatih.Keluargaintiadalahkeluargayang didalamnyaterdapattigaposisisosal,yaitu:ayah,ibu,dananak.Strukturkeluarga yang demikianmenjadikankeluarga sebagaorientasibagianak,yaitutempatkeluarga yang dilahirkan.Sedangkankeluargabatihadalahkeluargadidalamnya menyertkan posisi lain.

Adapun menurut Lee dikutip dalam buku Sri Lestari, kompleksitas struktur keluargatidakditentukanolehindividu yang menjadikananggotakeluarga,tetapi olehbanyaknyaposisisosal yang terdapatdalamkeluarga.Olehkarenaitu, besaran keluargayang ditentukanolehbanyakjumlahanggota,tidakidentikoleh strukturkeluarga(*familystructure*). Walaupun keduajenis variabel berbeda.³¹

C. Adat Lampung Pesisir Saibatin

1. Pengertian Umum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999) memberi batasan adat dalam ragam pengertian sebagai berikut:

- a. Adat sebagai aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.
- b. Adat sebagai kebiasaan; cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan.
- c. Adat sebagai cukai menurut peraturan yang berlaku (di pelabuhan).
- d. Adat sebagai wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.³²

³⁰Mufidah,*PsikologiKeluargaIslamBerwawasanGender...*,hlm.40-41.

³¹Sri Lestari,*PsikologiKeluarga...*,hlm.6-7.

³²Prof. Dr. I Gede A. B. Wiranata, S.H., M.H., *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*(Malang: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 3.

Berdasarkan uraian di atas Adat adalah kebiasaan-kebiasaan perilaku manusia di dalam masyarakat yang merupakan bagian dari kebudayaan. Di dalam adat Lampung sebagaimana juga di dalam adat di daerah-daerah lain terdapat nilai-nilai yang sesuai dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Adapun menurut Dr. Soepomo sebagai ahli hukum adat Indonesia yang pertama, memberikan suatu rumusan mengenai pengertian tentang hukum adat antara lain sebagai berikut :

- a. Hukum Non Statutair
“ Hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itu pun meliputi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri”.
- b. Hukum adat tidak tertulis
“Dalam tata hukum baru Indonesia, baik kiranya guna menghindarkan salah pengertian, istilah hukum adat ini dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*unstatutory law*), hukum hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (Parlemen, Dewan Propinsi), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (*judge made law*), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup baik di kota-kota maupun di desa-desa (*customary law*), semua inilah merupakan hukum adat atau hukum yang tidak tertulis yang disebut oleh pasal 32 UUD sementara tersebut”.³³

³³Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hal. 17-18.

Hukum adat adalah bagian dari hukum, ialah hukum tidak tertulis dalam suatu masyarakat, yang terjadi dari keputusan-keputusan orang-orang berkuasa dalam pengadilan.³⁴

Hukum adat adalah aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi (sehingga disebut hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasi (sehingga dikatakan adat).³⁵

Hukum adat merupakan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku, sedangkan perilaku yang dilakukan secara terus menerus dapat menimbulkan kebiasaan. Apabila kebiasaan itu dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat lambat laun akan menjadi adat dari masyarakat tersebut.³⁶

2. Sistem Hukum Adat

Secara sosiologis, hukum dan juga hukum adat merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu pedoman berperilaku yang memberikan patokan-patokan yang harus dilakukan, yang dilarang dan yang diperbolehkan untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sistem nilai-nilai menghasilkan patokan-patokan bagi suatu proses psikologis yang berwujud

³⁴Wita Herlina. h.28

³⁵*Op.Cit.*,h. 11

³⁶Anissa Tanjung Sari, S.H., "Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua dari Hasil Perkawinan Leviraat dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Lampung Pepadun" *Tesis Magister Kenotariatan*, (Universitas Diponegoro, 2005), h. 14

sebagai pola-pola berpikir yang menentukan sikap manusia. Sikap itu membentuk norma-norma yang kemudian mengatur perilaku manusia.

Hukum merupakan bagian dan sistem norma-norma yang secara sosiologis dibuat dan diperkuat oleh lembaga-lembaga atau pihak yang berwenang. Dengan mengutip pendapat Scholten, Soepomo berpendapat :

“Bahwa setiap hukum merupakan suatu sistem tersendiri, hal ini disebabkan oleh hukum itu mencakup peraturan-peraturan yang merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran.”³⁷

Suatu sistem hukum adat merupakan bagian integral dari sistem sosial secara menyeluruh. Dasar sistem hukum adat adalah sistem sosial yang menjadi wadahnya, yang secara tradisional dapat dikembalikan pada faktor kekerabatan dan wilayah atau kesatuan tempat tinggal. Sistem sosial itu biasanya disebut masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum adat. Di dalam masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum adat lazimnya berlaku bentuk kerjasama yang dinamakan gotong-royong. Gotong-royong menurut Soerjono Soekanto adalah :

“Bentuk kerjasama yang spontan yang sudah terlembagakan yang mengandung unsur-unsur timbal balik yang sukarela antara warga desa dengan kepala/pemerintah desa serta musyawarah desa, untuk memenuhi kebutuhan desa yang insidental maupun yang kontinu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama, baik material maupun spiritual”.³⁸

Sistem hukum adat bersendi atas dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang sudah pasti berlainan dengan alam pikiran yang menguasai hukum Barat

³⁷Soepomo, *Hubungan Individu dalam Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983. Hal. 49.

³⁸Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Kurnia Era, Jakarta, 1981. Hal. 45.

yang sifatnya individualistis-liberalistis, hukum adat memiliki corak-corak sebagai berikut :

- a. Mempunyai sifat kebersamaan atau sifat komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan mahluk dalam ikatan dalam kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat.
- b. Mempunyai corak religio-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
- c. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan hidup yang konkrit.
- d. Hukum adat mempunyai sifat yang visual, artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat.³⁹

3. Sistem Kekeluargaan dalam Hukum Adat

Persekutuan-persekutuan hukum Indonesia yang bentuk dan susunan masyarakatnya merupakan persekutuan hukum adat, yang para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat *genealogis* dan *territorial*. Masyarakat hukum territorial adalah masyarakat yang anggota-anggotanya hidup dan terikat pada suatu daerah kediaman tertentu. Dalam hal ini orang dapat untuk sementara waktu meninggalkan tempattinggalnya tanpa kehilangan keanggotaannya dari golongan tersebut. Begitu pula orang yang datang dari luar dapat masuk jadi anggota kesatuan dengan memenuhi persyaratan adat setempat. Menurut Van Dijk persekutuan hukum territorial itu dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu :

- a. Persekutuan Desa, yang termasuk persekutuan desa adalah seperti desa orang Jawa, yang merupakan satu tempat kediaman bersama di dalam daerahnya sendiri termasuk beberapa pedukuhan yang terletak di sekitarnya yang tunduk pada perangkat desa yang berkediaman di pusat desa.

³⁹Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1968. Hal. 68.

- b. Persekutuan Daerah, adalah seperti kesatuan masyarakat “*Nagari*” di Minangkabau, “*Marga*” di Sumatra Selatan dan Lampung, “*Negorij*” di Minahasa dan Maluku dimasa lampau, yang merupakan suatu daerah kediaman bersama dan menguasai tanah hak ulayat bersama yang terdiri dari beberapa dusun atau kampung dengan satu pusat pemerintahan adat bersama.
- c. Pemerintah Desa, adalah apabila di beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerjasama untuk mengatur kepentingan bersama.⁴⁰

Masyarakat hukum *genealogis* adalah persatuan hukum berdasarkan atas pertalian suatu keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.

Menurut para ahli hukum adat masyarakat yang *genealogis* itu dapat dibedakan dalam tiga macam sistem kekeluargaan, yaitu :

- a. Sistem kekeluargaan *patrilinial*, yaitu suatu masyarakat hukum yang para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak, bapak dari bapak, terus ke atas sehingga akhirnya dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya.

Akibat hukum yang timbul dari sistem *patrilinial* ini adalah, bahwa isteri karena perkawinannya (biasanya perkawinan dengan sistem pembayaran uang jujuran) dikeluarkan dari keluarganya kemudian masuk dan menjadi keluarga suaminya. Anak-anak yang lahir menjadi keluarga bapak (suami), harta yang ada milik bapak (suami) yang nantinya diperuntukkan bagi anak-anak keturunannya. Dalam hal ini isteri bukan ahli waris dalam keluarga suaminya, tetapi ia anggota keluarga yang dapat menikmati hasil dari harta

⁴⁰Hilman Hadikusuma., hal. 107.

tersebut seandainya pun suaminya meninggal dunia. Sepanjang dia tetap setia menjanda dan tinggal di kediaman keluarga suaminya dengan anak-anaknya serta menjaga tetap nama baik suami dan keluarga suami, dia tetap mempunyai hak menikmati harta peninggalan almarhum suaminya. Sistem kekeluargaan *patrilineal* ini biasanya terdapat pada masyarakat hukum adat: Lampung, Bali, Batak Nias, Seram, Ambon.

- b. Sistem kekeluargaan *matrilinial*, adalah suatu sistem yang anggota masyarakatnya menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya.

Akibat hukum yang timbul adalah semua keluarga menjadi keluarga ibu, anak-anak masuk keluarga ibu, serta mewaris dari keluarga ibu. Suami atau bapak tidak masuk dalam keluarga ibu atau masuk keluarga isteri. Dapat dikatakan bahwa sistem kekeluargaan yang ditarik dari pihak ibu ini, kedudukan wanita ini lebih menonjol dari pada pria di dalam pewarisan. Sistem kekeluargaan *matrilineal* ini biasanya terdapat pada masyarakat hukum adat : Minangkabau, Enggano.

- c. Sistem kekeluargaan *parental* atau *bilateral*, adalah masyarakat hukum yang para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak dan ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai moyangnya. Dalam sistem ini kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan, termasuk dalam hal mewaris.⁴¹ Sistem kekeluargaan parental atau bilateral ini biasanya terdapat pada masyarakat hukum adat Jawa, meliputi

⁴¹I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, (Semarang, Universitas Diponegoro, 1995). H.12

Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Aceh Riau, Sumatra Timur, Sulawesi dan Kalimantan.

4. Struktur Kekerabatan Masyarakat Lampung Secara Umum

Masyarakat Lampung menganut falsafah hidup Piil Pesenggiri dan bermoral tinggi yang didukung identitas pribadi, *juluk adek*, dan perilaku sikap *nemui nyimah, nengah nyapur, sakai sembayan*. Falsafah hidup ini merupakan acuan masyarakat untuk bersifat terbuka dan memiliki rasa solidaritas yang tinggi baik dengan sesama kelompok maupun dengan masyarakat lainnya. Keadaan tersebut didukung dengan aksara dan bahasa Lampung sebagai alat komunikasi serta keimanan yang cukup tinggi khususnya agama Islam. Sebagian besar orang Lampung umumnya beragama Islam, tidak beragama Islam berarti dikeluarkan dari adat atau tersingkir dari pergaulan adat yang tradisional. Masyarakat adat Lampung itu sendiri dibedakan dalam dua golongan adat, yaitu yang beradat pepadun dan beradat peminggir.

Masyarakat adat Lampung adalah masyarakat genealogis yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang terbagi-bagi dalam masyarakat seketurunan menurut poyang asalnya masing-masing yang disebut “*buwai*”, misalnya *Buwai nunyai, Buwai unyi, Buwai subing, Buwai bolan, Buwai menyarakat, Buwai tambapupus, Buwai nyerupa, Buwai belunguh* dan sebagainya. Setiap kebuwaian itu terdiri dari berbagai “*jurai*” dari kebuwaian, yang terbagi-bagi pula dalam beberapa kerabat yang terikat pada satu kesatuan rumah asal (*Nuwou tuhou*), kemudian dari rumah asal itu terbagi lagi

dalam beberapa rumah kerabat (*Nuwou balak*). Adakalanya buwai-buwai itu bergabung dalam satu kesatuan yang disebut “*paksi*”.

Setiap kerabat menurut tingkatannya masing-masing mempunyai pimpinan yang disebut “*punyimbang*” yang terdiri dari anak tertua laki-laki yang mewarisi kekuasaan ayahnya secara turun temurun.

Dalam menata kekeluargaan masyarakat Lampung berdasarkan pada ikatan darah. Dikatakan sangat kuat karena seorang dituntut untuk mengetahui susunan kekeluargaan minimal tiga garis keturunan ke atas (*vertikal*) dan ke samping (*horizontal*). Contohnya : Seseorang harus tahu siapa kakek dan neneknya serta buyutnya, sedangkan secara *horizontal* ia harus tahu siapa saudara ibunya (*kelamo*) laki-laki dan perempuan (*henulung*) dan seterusnya dua garis keatas.

Masyarakat Lampung memiliki struktur kekeluargaan yang relatif jelas dan masing-masing tingkatan jelas wewenangnya. Bila diperhatikan dari struktur panggilan kakak beradik yang digunakan pada diri pribadi seseorang.

Hal ini terlihat pada sistem penataan panggilan kakak beradik yang digunakan oleh seseorang dengan urutan yang umumnya sebagai berikut :

- a. Suttan/Suntan/Settan
- b. Pangiran
- c. Rajo/Raja/Ratu
- d. Ngedoko/Dalam/Batin
- e. Radin

Struktur masyarakat adat ini memunculkan suatu lembaga kepemimpinan yang disebut Kepunyimbangan. Lembaga kepunyimbangan ini pada hakekatnya menunjukkan tingkat kewenangan seseorang dalam keluarga, kerabat dan masyarakat adat, baik dalam suatu kebuayan, kelompok dan masyarakat adat lainnya. Lembaga kepunyimbangan berwenang menciptakan norma sosial, norma hukum sebagai pedoman bagi warga masyarakat adat untuk berperilaku dalam pergaulan sesama anggota maupun dengan masyarakat lainnya. Sesuai dengan kewenangan yang melekat padanya, lembaga kepunyimbangan ini memperhatikan juga prinsip kebersamaan dalam kehidupan bermusyawarah dalam mendapatkan kata mufakat yang kemudian menjadikannya keputusan yang harus ditaati oleh seluruh warga masyarakatnya. Keputusan musyawarah ini menciptakan dan menetapkan pola perilaku umum anggota masyarakat yang berbentuk norma yang berisikan kebolehan dan larangan. Segala sesuatu keputusan berupa ketetapan para punyimbang ini harus dilakukan dalam suatu rapat yang disebut perwatin adat.(musyawarah para punyimbang adat) sesuai dengan tingkatannya. Punyimbang memiliki kewenangan yang cukup luas mengatur kehidupan dan kehidupan anggota masyarakat baik-baik yang berkenaan dengan hubungan sesama anggota masyarakat maupun yang berkenaan dengan lingkungan alam sekitarnya.

Secara sistematis tanggung jawab punyimbang dilaksanakan secara berjenjang yaitu masalah yang menyangkut suku diselesaikan oleh para punyimbang suku, dilaporkan kepada punyimbang kampung atau buwai yang ada

di kampung yang bersangkutan. Gambaran ini menunjukkan bahwa tingkatan musyawarah itu dimulai dari musyawarah keluarga, musyawarah suku dan musyawarah kampung (marga).

Masyarakat Lampung pada hakekatnya adalah masyarakat yang religius yang taat, artinya masyarakat yang hidup penuh dengan kedamaian dan keseimbangan antara dunia dan akhirat, jasmani dan rohani. Sebagai implementasi dalam kehidupan sehari-hari apabila terdapat perbedaan atau konflik dalam perilaku maka kaedah keagamaan (khususnya agama Islam) yang digunakan sebagai ukuran perbuatan yang baik dan benar, disamping norma kebiasaan.



BAB III

GAMBARAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

A. Gambaran Umum Kabupaten Pesisir Barat

1. Gambaran Umum Pesisir Barat

Kabupaten Pesisir Barat secara administratif termasuk dalam wilayah Provinsi Lampung dengan batas geografis sebelah utara dengan Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (Provinsi Sumatera Selatan); sebelah timur dengan Kecamatan Pematang Sawah dan Kecamatan Semaka, sebelah selatan dengan Samudera Hindiad dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kaur (Provinsi Bengkulu). Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 (Lembaran Negara Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364) yang diundangkan tanggal 17 November 2012 ini memiliki luas wilayah sekitar 2.907,23 km² atau 495.04 ha dengan titik koordinat 4° 40' 00" – 6° 0' 00" Lintang Selatan dan 103° 30' 00" – 104° 50' 00" Bujur Timur.

Penduduk Kabupaten Pesisir Barat berjumlah 144.763 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 33.292. Jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, maka jumlah penduduk laki-lakinya mencapai 76.240 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan mencapai 68.523 jiwa.⁴²

⁴²BPS Kabupaten Lampung Barat, 2013

Tabel 1
Status jumlah penduduk berdasarkan kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah penduduk (%)
1	Pesisir Selatan	21.761 jiwa (5,09%)
2	Bengkunat	7.620 jiwa (5,61%)
3	Bengkunat Belimbing	24.009 jiwa (5,61%)
4	Ngambur	17.953 jiwa (4,20%)
5	Pesisir Tengah	18.358 jiwa (4,29%)
6	Karya Penggawa	14.292 jiwa (3,34%)
7	Way Krui	8.328 jiwa (1,95%)
8	Krui Selatan	8.531 jiwa (1,99%)
9	Pesisir Utara	8.202 jiwa (1,92%)
10	Lemong	14.365 jiwa (3,36%)
11	Pulau Pisang	1.343 jiwa (0,31%)

Sumber data: observasi, 20 juni 2018BPS Pesisir Barat (Kabupaten Induk)

Berdasarkan table diatas terdapat sebelas kecamatan yang ada dipesisir barat yang dihuni kurang lebih 144762 jiwa.

Pola pemukiman penduduk Pesisir Barat umumnya perumahan berada di sekitar jalan, baik itu jalan kabupaten, kecamatan, maupun desa, berjajar, dengan arah menghadap ke jalan (pola pita/ribbon). Arah rumah yang berada bukan di pinggir jalan pun arahnya mengikuti yang ada di pinggir jalan. Sebagian besar rumah tersebut masih berbentuk tradisional yang mengelompok dan tersebar secara sporadis. Adapun cirinya berupa

bangunan semi permanen berbentuk panggung, menggunakan sumur Tradisi Lisan Hahiwang.

(Ali Gufron) 395 (air tanah) sebagai sumber air minum, dan kurang atau belum mendapat pasokan listrik. Khusus untuk pasokan listrik, kabupaten baru ini relatif masih kurang. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila sering terjadi pemadaman listrik secara bergilir. Bahkan, pemadaman hampir terjadi setiap hari dengan jangka waktu antara beberapa jam hingga beberapa hari. Untuk mensiasatinya hampir di setiap rumah memasang genset berbahan bakar solar agar tetap menikmati listrik. Letak Kabupaten Pesisir Barat yang relatif jauh dari ibukota provinsi (Bandar Lampung) membuat perekonomian mayoritas penduduknya masih mengandalkan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Aktivitas perekonomian mencapai 2,9 triliun yang dibagi menjadi beberapa kategori lapangan usaha, yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan 52,90%; pertambangan dan penggalan 5,15%; industri pengolahan 5,37%; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 0,06%; konstruksi 5,09%; perdagangan besar/eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor 11,23%; transportasi dan pergudangan 0,9%; penyedia akomodasi dan makan minum 1,55%; informasi dan komunikasi 1,56%; jasa keuangan dan

asuransi 1,64%; real estate 3,55%; jasa perumahan 0.14%; dan administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial 5,17%.⁴³

Letak Kabupaten Pesisir Barat yang relatif jauh dari ibukota provinsi (BandarLampung) membuat perekonomian mayoritas penduduknya masih mengandalkan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut data dari BPS Lampung Barat (Kabupaten Induk) tahun 2013, aktivitas perekonomian mencapai 2,9 triliun yang dibagi menjadi beberapa kategori lapangan usaha, yaitupertanian, kehutanan dan perikanan 52,90%, pertambangan dan penggalian 5,15% industri pengolahan 5,37% pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 0,06%; konstruksi 5,09%; perdagangan besar/eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor 11,23%; transportasi dan pergudangan 0,9%; penyedia akomodasi dan makan minum 1,55%; informasi dan komunikasi 1,56%; jasa keuangan dan asuransi 1,64%; real estate 3,55%; jasa perumahan 0.14%; dan administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial 5,17%. 2. Struktur Masyarakat Pesisir Barat Masyarakat Pesisir Barat merupakan pendukung adat Saibatin (Peminggir) yang umumnya bertempat tinggal di sekitar pantai, mulai dari Krui hingga Kayu Agung (Harsono, 2013:246). Sebagai sebuah kesatuan sosial, mereka mempunyai struktur tersendiri yang tercermin dalam kelas-kelas sosial yang ditentukan berdasarkan asal usul serta hubungan kekerabatan. Struktur tersebut dipertahankan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam

⁴³BPS Lampung Barat (Kabupaten Induk) tahun 2013

bentuk mitosmitos sebagai perwujudan keyakinan yang berkembang menjadi identitas kelompok (Rudito, 2013:3).

Menurut mitos tentang asal usul, orang Pesisir Barat berkeyakinan bahwa mereka berasal dari keturunan Kepaksian Skala Brak atau Sekala Beghak yang lokasinya berada di kawasan lereng Gunung Pesagi (sekarang di sekitar Kabupaten Lampung Barat).

Sebelum menjadi kepaksian, menurut Masduki (2006: 23-25), pada abad 15 datang empat kelompok masyarakat yang menduduki sekitar Danau Ranau. Di sebelah barat danau dihuni orang-orang yang datang dari Pagaruyung Sumatera Barat pimpinan Dipati Alam Padang. Di sisi timur danau, kelompok orang-orang Sekala Beghak yang dipimpin Pangeran Liang Batu dan Pahlawan Sawangan (berasal dari Kepaksian Nyekhupa) serta kelompok yang dipimpin Raja Singa Jukhu (dari Kepaksian Bejalan Di Way). Sementara kelompok terakhir menempati sisi utara danau yang dipimpin Umpu Sijadi Helau yang juga dari Sekala Beghak. Mereka kemudian berbaur dan membentuk sebuah persekutuan buway (keturunan) bernama Kepaksian Sekala Baghak dan membaginya menjadi empat marga atau kebuayan, yaitu: (1) Umpu Bejalan Di Way memerintah daerah Kembahang dan Balik Bukit dengan Ibu Negeri Puncak, daerah ini disebut dengan Paksi Bejalan Di Way; (2) Umpu Belunguh memerintah daerah Belalau dengan Ibu Negerinya Kenali, daerah ini disebut dengan Paksi Buay Belunguh; (3) Umpu Nyerupa memerintah daerah Sukau dengan Ibu Negeri

Tapak Siring, daerah ini disebut dengan Paksi Buay Nyerupa; dan (4) Umpu Pernong memerintah daerah Batu Brak dengan Ibu Negeri Hanibung, daerah ini disebut dengan Paksi Buay Pernong.

Keempat paksi tersebut mengutus lima orang penggawanya (Raja Penyukang Alam, Raja Panglima, Raja Nurakdim, Raja Belang, dan Nungkah Nungkeh Dego Pemasok Rulah) untuk membantu Lumia 396 Patanjala Vol. 9 No. 3 September 2017: 391 - 406 Ralang Pantang dari Pantau Kota Besi yang masih keturunan Pangeran Tanah Jaya dari daerah Banten (Imron, 2014). Bersama-sama mereka menumpas sukubangsa Tumi yang tinggal di sekitar wilayah Pesisir Barat. Setelah berhasil ditaklukkan kelima penggawa bersepakat mendirikan kerajaan yang diberi nama Penggawa Lima di bekas wilayah orang Tumi. Masing-masing menempati wilayah yang telah disepakai bersama. Raja Penyukang Alam bersama marga-marga yang dinaunginya menempati wilayah Cukuh Mersa (Bandar), Raja Panglima menempati wilayah Pekon Teba (Perpasan), Raja Nurakdim menempati wilayah Pematang Gedung (Pekon Balak - Laay), Raja Belang menempati wilayah Pematang Gedung (Pekon Laay), dan Raja Nungkah Nungkeh Dego Pemasok Rulah menempati wilayah Pagar Dewa.⁴⁴ (Imron, 2015). Pada masa kekuasaan Inggris, wilayah pesisir barat Lampung menjadi salah satu Onderafdeling dalam wilayah administrasi Regenschap (Karesidenan) Bengkulu. Sebagai konsekuensinya, struktur kekuasaan lokal

⁴⁴ Ali, Imron. 2005. *Pola Perkawinan Saibatin*. Universitas Lampung: Bandar Lampung

berada di bawah Onderafdeling melalui Inlandsche Gemeent Ordonantie Buitengewestan (peraturan dasar mengenai pemerintahan desa) (Imron, 2014). Menurut Masduki (2006: 27) pada masa ini kekuasaan marga-marga Penggawa Lima dan kebuayan Sekala Bekhak dipecah menjadi: (1) Bukti-bukti terdiri atas Marga Sukau, Marga Liwa, Marga Kembahang, Marga Batu Brak, Marga Kenali, Marga Suoh, Marga Way Tenong; (2) Krui Utara terdiri atas Marga Pulau Pisang, Marga Pugung Tampak, Marga Pugung Penengahan, Marga Pugung Malaya; (3) Krui Tengah terdiri atas Marga Way Sindi, Marga Laay, Marga Bandar, Marga Pedada, Marga Ulu Krui, Marga Pasar Krui, Marga Way Napal; dan (4) Krui Selatan terdiri atas Marga Tenumbang, Marga Ngambur, Marga Ngaras, Marga Bengkumat, Marga Belimbing. Perkembangan selanjutnya, kebuayan Paksi Sekala Beghak menjadi enam, yaitu: Belunguh (Kenali), Pernong (Batu Brak), Bejalan Di Way (Kembahang), Nyerupa (Sukau), Bulan/Nerima (Lenggiring), dan Buay Menyata/Anak Mentuha (Luas). Namun, dari enam kebuayan tersebut hanya empat yang menjadi Raja. Dua buay yang tidak memerintah adalah Buay Menyata/Anak Mentuha dan Buay Bulan/Nerima. Buay Menyata yang merupakan penghuni pertama Kerajaan Skala Brak diangkat sebagai Anak Mentuha atau yang dihormati, sedangkan Buay Nerima merupakan Nakbar/Mirul (anak perempuan yang diambil orang). Saat ini, berdasarkan SK Gubernur Lampung No. G/362/B.II/HK/1996, wilayah adat marga-marga di wilayah Pesisir memiliki batas yang cukup jelas. Masing-masing marga dipimpin oleh seorang kepala marga dan memiliki tujuh tingkatan Gelar

yaitu: Suntan, Raja, Batin, Radin, Minak, Kimas dan Mas. Adapun nama-nama Marga di Wilayah Pesisir di Kabupaten Pesisir Barat Lampung yakni: Belimbing Bandar Dalam Bengkumat, Bengkumat Sukamarga Bengkumat, Ngaras Negeri Ratu Ngaras Bengkumat, Ngambur Negeri Ratu Ngambur Pesisir Selatan, Tenumbang Negeri Ratu Tenumbang Pesisir Selatan, Way Napal Way Napal Pesisir Tengah, Pasar Krui Krui Pesisir Tengah, Ulu Krui Gunung Kemala Pesisir Tengah, Pedada (Penggawa V Ilir) Pedada Pesisir Tengah, Bandar (Penggawa V Tengah) Bandar Pesisir Tengah, Laay (Penggawa V Ulu) Laay Karya Penggawa, Way Sindi Karya Penggawa, Pulau Pisang Pesisir Utara, Pugung Tampak Pesisir Utara, Pugung Penengahan Lemong, dan Pugung Malaya Lemong.

Kabupaten Pesisir Barat disebut juga Masyarakat Saibatin. Menurut H. Alimin Yafawi (2005 : 3) kata "Saibatin berasal dari kata Sai yang artinya satu dan Batin artinya hati".

Sedangkan menurut H. Hilman Hadikusuma. (1985:18) "Saibatin dalam arti sehari - hari adalah kesatuan masyarakat adat yang membentuk suatu marga adat". Menurut istilahnya Saibatin berasal dari kata Sai atau satu, yang dimaksudkan adalah persatuan para punyimbang adat dan punyimbang marga untuk permusyawaratan dalam melaksanakan peradilan adat yang dihadiri para pemuka adat setempat. Saibatin sesungguhnya berarti permusyawaratan (peradilan) adat yang diadakan oleh paksi-paksi adat untuk menyelesaikan peristiwa-peristiwa adat yang terjadi dengan rukun dan

damai. Adat saibatin dalam kenyataannya adalah mengakui bahwa segala aturan yang berlaku di dalam masyarakat adat tersebut merupakan hasil musyawarah para punyimbang adat atau punyimbang marga. Asal mula munculnya Adat Saibatin adalah sebagai hasil proses kunjungan ke kerajaan Islam (Banten) dalam rangka belajar ilmu agama. Kunjungan ini dinamakan Siba (Alimin Syafawi, 2005 :3). Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Lampung Saibatin adalah segala peraturan yang berlaku disuatu tempat berdasarkan permusyawaratan (peradilan) adat yang diadakan oleh perwatin adat atau para paksi-paksi adat dan para pengelola dan pengurus gawi kerajaan yang lainnya. untuk menyelesaikan peristiwa-peristiwa adat yang terjadi dengan rukun dan damai.

2. Kondisi Topografi Pesisir Barat

Kabupaten Pesisir Barat secara topografi dapat dibagi kedalam topografi dari permukaan laut, dimana mencakup seluruh Kecamatan wilayah Pesisir (Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Pesisir Tengah dan Kecamatan Pesisir Selatan) pada sepanjang pantai Barat wilayah ini. Topologi perbukitan, yang memiliki ketinggian antara 600-1000 meter diatas permukaan laut, yang meliputi TNBBS dan lain-lainnya terdmasuk dalam wilayah ini.

Kabupaten Pesisir Barat, yang memiliki luas wilayah $\pm 2.907,23$ KM Persegi. Beribu Kota di Krui, dengan jumlah penduduk sebesar ± 136.370 jiwa pada tahun 2011 dan 117 Desa/Kelurahan. Dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat

Provinsi Lampung dan diresmikan pada tanggal 22 April 2013. Secara geografis, Kabupaten Pesisir Barat memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. UTARA, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Desa Way Beluah dan Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan.
- b. SELATAN, Samudera Hindia.
- c. BARAT, Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.
- d. TIMUR Desa Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawa, Desa Sedayu, Desa Sidomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus

Wilayah Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Tahun 2009 secara administratif meliputi 17 (tujuh belas) Kecamatan dan terdiri dari 6 (enam) Kelurahan dan 194 Pekon atau Desa. Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Perda Nomor 01 Tahun 2010 tentang pembentukan 53 Pekon 1 Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, maka Kabupaten Lampung Barat menjadi 247 Pekon atau 7 Kelurahan.

3. Kondisi Iklim Kabupaten Pesisir Barat

Kondisi Iklim Kabupaten Pesisir Barat dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang dilewati oleh jalur Pegunungan Bukit Barisan dan Keberadaan Samudera Hindia disebelah Barat. Menurut Oldeman dan Las Davis (1970),

Kabupaten Pesisir Barat memiliki dua tipe iklim, yakni:

- a. Tipe iklim A, yang memiliki 8 Bulan basah, dimana meliputi bagian Barat Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
- b. Tipe iklim B, dengan jumlah Bulan basah 7-9 Bulan, yang terdapat dibagian Timur Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Secara umum curah hujan di daerah ini berkisar antara 2500-3000 mm/tahun. Tingkat kelembaban berkisar antara 50-80%, yang dikendalikan oleh regim sirhu dari panas (isohypothermic) pada dataran pantai di bagian Barat sampai dingin (iosthermic) di wilayah perbukitan.

4. Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Barat

Untuk mengarahkan gerak kabupaten pesisir Barat, di perlukan pedoman yang tertuang sebagai visi dan misi. Visi merupakan abstraksi atau angan-angan ideal untuk diwujudkan bersama dalam jangka panjang. Sedangkan Misi merupakan implementasi strategi yang di tetapkan untuk mewujudkan visi tersebut.

a. Visi

“Terwujudnya Masyarakat Pesisir Barat yang Madani, Mandiri dan Sejahtera”

Madani : Masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani dan memaknai kehidupannya, sebuah sistem sosial berdasarkan prinsip moral.

Mandiri : Kondisi tidak tergantung kepada orang lain secara ekonomi

Sejahtera : Berkecukupan

b. **Misi**

- 1) Mewujudkan masyarakat Pesisir Barat yang religius, cerdas, sehat dan berakhlak mulia.
- 2) Meningkatkan produktifitas ekonomi masyarakat pekon dan optimalisasi pemanfaatan kekayaan laut, pertanian, kehutanan, dan perkebunan sebagai basis ekonomi kerakyatan.
- 3) Meningkatkan infrastruktur, sumber daya energi dan mitigasi bencana serta penguatan ketahanan pangan masyarakat yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- 4) Mewujudkan Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah tujuan wisata yang berpijak pada kearifan lokal
- 5) Meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik (good governance)

5. **Potensi SumberDaya Alam**

a. Perikanan



Tabel 2

Jenis danAlatProduksi Budidaya IkanLautdanPayauTahun2013

NO	Jenis Alat	Jumlah Alat
1	Keramba	- Unit
2	Tambak	- Unit
3	Jermal	- Unit
4	Pancing	- 100 Unit

5	Pukat	- Unit
6	Jala	- 25 Unit

Sumber: Data Profil Pesisir Barat

Ket : (-) Tidak ada/tidak diketahui

Dari data tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa terdapat jenis dan alat produksi budidaya ikan laut dan payau yaitu alat tangkap ikan berupa jaring 100 unit dan jala 25 unit.

B. Kedudukan Anak Tertua Laki-Laki Dalam Adat Lampung Saibatin

Anak tertua Laki-laki dalam adat Lampung Saibatin adalah sebagai penerus keturunan yang sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, anak tertua laki-laki dituntut untuk bisa mengatur keluarga besar dan para kerabatnya. Dikarenakan masyarakat Lampung Saibatin mayoritas beragama Islam. Anak tertua laki-laki dalam adat Lampung Saibatin adalah pemimpin bagi keluarga dan bagi marga adatnya. Hukum adat Lampung Saibatin termasuk kedalam hukum adat yang tidak tertulis.

Dalam adat Lampung Saibatin anak tertua laki-laki memiliki peran berdasarkan hukum adat yang masih dipegang oleh masyarakat Lampung Saibatin tercermin dalam sistem dan perkawinan adat serta upacara-upacara adat Saibatin yang berlaku atas dasar musyawarah dan mufakat. Punyimbang adat, dimana anak tertua laki-laki dari keturunan Punyimbang memegang kekuasaan adat.

Anak tertua laki-laki dalam adat Lampung Saibatin selain memiliki peran

dalam keadatan dan kehidupan bermasyarakat juga memiliki Kedudukan dalam keluarga, antara lain sebagai ahli waris, sebagai pemimpin keluarga dan sebagai pengayom keluarga. Ketiga kedudukan anak laki-laki tertua tersebut merupakan salah satu keadatan yang masih di pegang oleh masyarakat Lampung Saibatin.

Dari hasil penelitian penulis tentang kedudukan anak tertua laki-laki dalam adat Lampung Saibatin adalah sebagai berikut :

1. Sebagai Ahli Waris

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang sudah meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang memuat ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud dari pewaris kepada para warisnya yang dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.

Pengaturan kewarisan menurut masyarakat adat Lampung didasarkan pada sistem kewarisan mayoritas laki-laki, artinya anak laki-laki tertua pada saat si pewaris meninggal dunia berhak penuh menguasai seluruh harta warisan orang tuanya. Pengertian berhak penuh disini adalah dalam hal pengaturan dari hasil harta warisan orang tuanya. Dikatakan demikian karena anak laki-laki tertua mempunyai tanggung jawab penuh untuk memelihara, membina dan

mempertahankan kehidupan yang layak dari seluruh keluarga, yaitu adik-adik dan orang tua yang hidup, misalnya terhadap adik-adik yang masih belum dapat berdiri sendiri seperti belum berkeluarga, masih sekolah dan sebagainya.

Hal ini diungkapkan Bapak Yumansir selaku raja penimbang adat saibatin pekon bambang dalam suatu wawancara yang menjelaskan terkait tanggung jawab sebagai ahli waris :

“...Di dalam adat lampung yang mewarisi harta adalah anak tuha laki-laki, sebagai pewaris harta ada kewajiban yang harus dilaksanakan seperti mebagi atau memberi adik-adiknya walaupun cuma sebagian saja, anak tuha juga berkewajiban membiayai sekolah adik-adiknya sampai selsai oleh sebab itu anak tuha juga bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya seperti kehidupan sehari-hari”⁴⁵

Sebagaimana diungkapkan oleh bapak Yumansir di atas, bahwa tanggung jawab anak laki-laki tertua (anak tuha) dalam pengelolaan merupakan suatu keseharusan dimana dalam adat lampung pesisir anak laki-laki (anak tuha) mewarisi seluruh harta dari orang tua, adapun tujuannya adalah untuk melanjutkan kehidupan keluarga ataupun adik-adiknya. Apabila adik-adiknya masih dalam tahap pendidikan maka peran kakak tertua adalah membiayai sampai selsai bahkan sampai adik-adiknya berumah tangga, disamping itu juga harta pusaka keluarga tetap dipegang dan dikuasai oleh anak laki-laki tertua.

Menurut hukum adat Lampung saibatin yang termasuk warisan bukan hanya harta benda pewaris saja tapi juga nama besar keluarga dan gelar adat yang

⁴⁵Bapak Yumansir, selaku Raja Penimbang Adat Saibatin Pekon Bambang Pesisir Barat, Wawancara. 10 Juni 2018

disandang oleh pewaris didalam hukum adat. Seorang ahli waris didalam hukum adat akan memegang peranan penting didalam keluarganya karena dia dianggap pengganti ayah dalam tanggung jawab keluarga besarnya , baik dalam hal pengurusan harta waris yang ditinggalkan, bertanggung jawab atas anggota keluarga yang ditinggalkan pewaris,dan juga menjaga nama baik keluarga.

Adapun permasalahan yang muncul dalam pembagian harta waris tersebut sebagaimana diungkapkan oleh bapak Sapahan sebagai Dalom mangku alam dalam hasil wawancara :

*“...ada, seperti yang tadinya kakak tertua laki-laki (anak tuha) itu harus membiayayai adik-adiknya dalam pendidikan tetapi, malah memakan harta warisan dengan sendiri dan ada pula harta waris tersebut bukanya dikelola dengan baik melainkan dijual bahkan dihabiskan untuk berpoya-poya ini lah persoalan yang muncul pada anak tuha sekarang ini”.*⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak Sapahan diatasbahwa permasalahan tersebut seringkali terjadi pada masa sekarang ini salah satu faktor penyebabnya adalah lunturnya budaya adat, maka oleh sebab itu harta waris yang tadinya digunakan untuk keperluan adik-adiknya disalah gunakan, bahkan menganggap harta waris tersebut adalah hak penuh atas miliknya sendiri. Perselahan inilah yang kerap terjadi sehingga berdampak perpecahan dalam suatu keluarga.

Sedangkan menurut hukum adat lampung laki-laki adalah sebagai penerus keturunan yang sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam

⁴⁶Bapak Sapahan selaku DalomMangku Alam pekon Bambang Pesisir Barat, *Wawancara 10 Juni 2018*

hal ini, anak laki-laki dituntut untuk bisa mengatur keluarga besar dan para kerabatnya. Dikarenakan masyarakat Lampung mayoritas agama Islam jadi laki-laki adalah pemimpin bagi keluarga dan pemimpin bagi marga adatnya. Dalam hukum adat Lampung Saibatin termasuk kedalam hukum adat yang tidak tertulis.

2. Sebagai Pemimpin Keluarga

Berbicara tentang peran kakak tertua laki-laki (anak tuha) sebagai pemimpin keluarga sistem kekerabatan masyarakat Lampung berporos pada prinsip keturunan menurut garis bapak (patrilineal) dimana kedudukan anak laki-laki tertua (anak puyimbang) memegang kekuasaan sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, kerabat dan marga atau masyarakat adatnya. Anak puyimbang adalah puyimbang (pemimpin keturunan) yang berhak dan berkewajiban mengatur hak-hak dan kewajiban adik-adiknya yang pria maupun wanita yang belum menikah dan mengikuti kedudukan suami dalam batas-batas kedudukannya sebagai puyimbang adat dan puyimbang marga adat kekerabatannya.

Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Darsan S.pd selaku Kepala Adat Saibatin Pekon Tanjung Jati dalam suatu wawancara.

*“kalau sebagai pemimpin keluarga anak tuha disini tanggung jawabnya yaa.. mengatur atau mengarahkan adik-adiknya terus menepahi keluarganya, yaa...pokoknya permasalahan keluarga dikendalikan oleh anak tuha, baik terhadap lingkungan ataupun didalam adat yang menyangkut adat kekerabatan”.*⁴⁷

⁴⁷Bapak Ahmad Darsan S.Pd, Raja Penyimbang Adat Saibatin pekon Tanjung Jati Kec Lemong Kab Pesisir Barat, *Wawancara* 08 Juni 2018

Sebagaimana diungkapkan oleh bapak Ahmad Darsan S.Pd diatas bahwa sebagai pemimpin keluarga sudah tentu memiliki jiwa kepemimpinan dan harus juga memiliki kebijakan-kebijakan supaya terciptanya keluarga yang harmonis dan damai. Adapun perbedaan kedudukan hak dan kewajiban antara kerabat pria (ayah) dan kerabat wanita (ibu). Yang berfungsi sebagai pengatur adalah pihak laki-laki dan pihak perempuan hanya bersifat membantu. Misalnya dalam adat perkawinan, maka yang berfungsi dan berperan adalah pihak pria (saudara adik beradik pria) sedangkan pihak wanita (termasuk suaminya) hanyalah bersifat membantu dalam rangka menghormati kedudukan ipar ataupun mertua. Demikian halnya dalam fungsi dan peranannya dibidang adat yang menyangkut adat kekerabatan.

3. Sebagai Pengayom Keluarga

Melihat dari pengamatan observasi yang penulis lakukan dengan adanya Sistem kekerabatan Lampung yang berpokok pangkal pada satu rumah besar (Lamban balak dan Lamban gedung) anak punyimbang tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin keluarga tetapi juga berfungsi sebagai pengayom keluarga. Pengayom keluarga tidak hanya memimpin keluarga dalam adat kekerabatan saja tetapi mencakup keseluruhan fungsi sebagai anak punyimbang adat dan punyimbang marga yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap keluarga dan marga adatnya. Misalnya saja sebagai pengganti ayah, anak punyimbang harus membesarkan adik-adiknya, mendidik dan membiayai sekolah adik-adiknya, menanggung beban pengeluaran kehidupan sehari-hari (menafkahi ibu serta adik-

adiknya) serta bertanggung jawab membiayai pernikahan adik-adiknya.

Demikian halnya diungkapkan oleh Bapak Tambat dalam suatu wawancara yang menjelaskan terkait dengan pengayom keluarga.

*“anak tuha memang harus menganyomi keluarga, yaa....seperi kalau ada permasalahan anaknya maka anak tuha yang membela atau melindungi adek-adeknya tersebut. Terus yaa...pokoknya peran anak tuha disini sebagai penganyo memberikan kenyamanan dalam keluarga dan tidak membedakan adek-adeknya.Umpamaa ada kasus keributan antar adek-adeknya anak tuha tidak membela salah satu adeknya tersebut tetapi mendamaikan tanpa membela salah satunya”.*⁴⁸

Berbeda halnya diungkapkan oleh Bapak Muhammad Samsi salah satu Raja Adat di pekon Lemong kecamatan Lemong dalam sebuah wawancara.

*“...anak tuha sekarang kebanyakan bukannya sebagai penganyom keluarga atau adek-adeknya. Malahan memusuhi bahkan membuat bagaimana agar adek-adeknya pergi dari rumah, yaa... ya supaya tidak ada beban terhadap adeknya tersebut, yaa... seperti itulah permasalahan sekarang ini”.*⁴⁹

Demikian halnya yang diungkapkan oleh bapak Muhammad Samsi diatas bahwapengayom keluarga tidak hanya memimpin keluarga dalam adat kekerabatan saja tetapi mencakup keseluruhan fungsi sebagai anak punyimbang adat dan punyimbang marga yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap keluarga dan marga adatnya.

⁴⁸Bapak Tambat sebagai penyimbang adat Tanjung sakti Kec Lemong Kab Pesisir Barat, Wawancara 08 Juni 2018

⁴⁹Bapak Muhammad Samsi salah satu Raja Adat Kec Lemong Kab Pesisir Barat, Wawancara 08 Juni 2018



BAB IV
KEDUDUKAN ANAK TERTUA LAKI-LAKI
DALAM ADAT LAMPUNG SAIBATIN
DI KABUPATEN PESISIR BARAT

Padababinimenjelaskanhasil-hasildaripenelitian yang
didapatkandanmenjelaskanmengenaibagian-bagiansebelumnya.

Berdasarkanpaparanpadabab-babsebelumnyamakadapatdilihatbahwa, pudarnya tata
nilaidan peran-peran sosial dalam kehidupan masarakat sekarang ini dipengaruhi oleh
perkembangan globalisasi dan modernisasi yang semakin pesat, begitu juga dengan
kehidupan masyarakat lampung pada saat ini.Masyarakatadat lampung adalah
masyarakat genealogis yang menganut sistem kekeluargaan patrinal masih
memegang keadatan dimana anak tertua laki-laki walaupun terlahir sebagai anak
bungsu tetap menjadi anak yang dituakan.

Jika dilihat dari latar belakang sebelumnya sebagaimana yang telah penulis
paparkan pada BAB II bahwa, anaktertualaki-lakidalamadatlampung
saibatinmerupakan sebagai penerus keturunan dan berperan dalam menggantikan
kedudukan keluarga dalam keadatan. Anak laki-laki pada masyarakat lampung
saibatin sangatlahpenting dan sangat diharapkanbagimasyarakatlampungsaibatin.

Padadasarnya orang Lampung

Saibatinberdasarkangarisketurunanlurusdariataspemekonan

(menurutketurunanjurailurus).Hanyaanak tertualaki-lakidariketurunan yang paling tua
yangbisamenjadi raja (pemimpin), dantidakberlakubagisaudara-saudaranya yang
lebihmudauntukmenjadi raja ataupuntimbang.Apabiladarianaktertualaki-

laki tersebut tidak mempunyai anak laki-laki maka yang akan berhak menggantikannya (raja) adalah adik-adik dari raja ataupun imbangan tersebut.

Melihat kembali teori pada halaman 26 mengenai kedudukan anak tertua laki-laki ditinjau dari hukum Islam ialah sebagai pemimpin atau imam bagi keluarga maupun masyarakat sebagaimana dalam QS. An-Nisa Ayat 34. Kedudukan anak tertua laki-laki ditinjau dari hukum adat ialah dalam masyarakat lampung saibatin anak tertua laki-laki memiliki peran penting dalam keluarga, keadatan, serta kehidupan bermasyarakat. Kedudukan anak tertua laki-laki dalam adat lampung merupakan penerus silsilah keturunan dan menggantikan peran orang tua sebagai kepala rumah tangga dan meneruskan sistem kekerabatan ayahnya.

Adapun analisis dari data lapangan dan di landasi oleh teori adalah sebagai berikut:

A. Sebagai Ahli waris

Pelaksanaan sebagai ahli waris dalam BAB II dijelaskan di mana pada Pewaris adalah yang mewariskan harta benda, sedangkan ahli waris ialah yang menerima warisan tersebut. Dalam Adat Lampung Saibatin anak laki-laki merupakan ahli waris, sebab anak laki-laki mempunyai silsilah dan penegak hukum adat. Tahap ini adalah merupakan suatu proses yang dinamis dalam menuju suatu sasaran pengetahuan. Dengan layanan informasi secara langsung akan bisa membantu para peserta didik untuk memahami dirinya dan kaitannya dengan dunia kerja, pendidikan, sosial dan masalah-masalah masyarakat lainnya.

Sedangkan data lapangan menunjukkan bahwa peran kakak tertua sebagai ahli waris tidak sepenuhnya

sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku, sehingga ini sering kali membuat perpecahan dalam keluarga. Di dalam adat Lampung saibatin anak laki-laki (anak tuha) merupakan ahli waris tunggal, sebab anak laki-laki merupakan penyangga silsilah dan penegak hukum adat.

B. Sebagai pemimpin keluarga

Mengacu pada BAB II mengenai sebagai pemimpin keluarga, di dalam BAB III telah dipaparkan bahwa kakak tertua laki-laki (anak tuha) sebagai pemimpin keluarga sistem kekerabatan masyarakat Lampung berporos pada prinsip keturunan menurut garis bapak (patrilineal) dimana kedudukan anak laki-laki tertua (anak puyimbang) memegang kekuasaan sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, kerabat dan masyarakat adatnya. Yang dimaksud dengan pemimpin keluarga disini adalah anak laki-laki tertua memiliki tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga atau sebagai pengganti kedua orang tua, anak tuha juga melanjutkan silsilah adat atau menggantikan kedudukan orang tua dari membiayai kebutuhan adik-adiknya sampai memenuhi kebutuhan sehari-hari serta memegang kekuasaan sebagai penyangga adat.

Berdasarkan hasil data lapangan menunjukkan bahwa dapat dianalisis di dalam melakukan peran sebagai pemimpin keluarga yang telah dilakukan peran kakak tertua (anak tuha) di dalam masyarakat Lampung pesisir berubah fungsi. Kakak tertua yang

seharusnya menjadi pemimpin keluarga menjadi penyebab terjadinya kekeributan dalam rumah tangga. Permasalahan tersebut kerap kali terjadi akibat istri dari kakak tertua tidak mengikuti aturan di dalam kehidupan rumah tangga, seperti memegang keadilan rumah tangga diambil alih oleh istrinya. Hal ini dikarenakan kakak tertua kalah dalam mengambil sebuah kebijakan memimpin rumah tangga.

C. Sebagai Pengayom Keluarga

Berbicara tentang peran sebagai pengayom keluarga, sebagaimana dijelaskan dalam **BAB II** bahwa pengayom keluarga merupakan memberikan suatu kenyamanan dan ketenangan serta melindungi adik-adik yang ada kerabatnya.

Dengan adanya Sistem kekerabatan Lampung yang berpokok pangkal pada satu rumah besar (Lamban balak dan Lambangedung) anak punyimbang (anak tuha) tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin keluarga, tetapi juga berfungsi sebagai pengayom keluarga. Pengayom keluarga dalam adat kekerabatan adat Lampung mencakup keseluruhan fungsi dan memiliki tanggung jawab penuh terhadap keluarga dan masyarakatnya.

Pengayom keluarga dalam keadaan masyarakat Lampung pesisir anak tuha berperan memberikan suatu perlindungan dan kenyamanan dalam keluarga ataupun masyarakat sekitarnya. Misalnya saja sebagai pengganti ayah, anak punyimbang harus membesarkan adik-adiknya, mendidik dan membiayai sekolah adik-adiknya,

menanggung beban pengeluaran kehidupan sehari-hari (menafkahi ibu serta adik-adiknya) serta bertanggung jawab membiayai pernikahan adik-adiknya.

Data lapangan menunjukkan bahwa dalam peran kakak tertua (anak tuha) dalam kehidupan masyarakat Lampung pesisir sudah berubah fungsi, permasalahan yang terjadi pada sekarang ini peran kakak tertua yang tadinya menganyom dan melindungi keluarga dan adik-adiknya malahan memusuhi bahkan membuat bagaimana agar adik-adiknya tidak betah di rumah bahkan pergi meninggalkan rumah. Permasalahan inilah yang sering kali terjadi pada masyarakat Lampung pesisir sekarang ini, hal seperti ini sangat melenceng dari peran dan fungsi kakak tertua (anak tuha) sebagai penganyok keluarga.

Berdasarkan penejelasan di atas dapat penulis jelaskan bahwa dalam peran kakak tertua terdapat beberapa fungsi yang dapat dilaksanakan, dimana kakak tertua lah yang berpera aktif dalam keluarga dan keadatan Lampung. Penulis menemukan tiga peran kakak tertua dalam pembinaan keluarga pada adat Lampung yaitu sebagai ahli waris, sebagai pemimpin keluarga, dan sebagai penganyok keluarga. Ketiga peran tersebut dikatakan sangat berperan penting dalam keluarga maupun marganya untuk kepentingan bersama.

Menurut hukum Islam laki-laki adalah seorang pemimpin dan tidak ada perempuan yang menjadi pemimpin. Dalam hal ini laki-laki memang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan kedudukan perempuan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

C. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisis data yang ada dengan interpretasi makalah selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah kedudukan anak tertua laki-laki dalam adat Lampung Saibatin kabupaten Pesisir Barat penulis menemukan tiga kedudukan, yaitu sebagai ahli waris, sebagai pemimpin keluarga, dan sebagai pengayom keluarga.

Ketiga kedudukan tersebut merupakan tanggung jawab anak tertua laki-laki Lampung Saibatin dalam keluarga, adat, maupun marganya. Menurut hukum Islam laki-laki adalah seorang pemimpin. Dalam hal ini kedudukan anak tertua laki-laki dalam keluarga masyarakat adat Lampung Pesisir merupakan anak yang dituan, meskipun dia terlahir sebagai anak bungsu dan memiliki suatu kedudukan yang penting terhadap keluarga, adat, ataupun kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat adat Lampung Saibatin di kabupaten Pesisir Barat menganut garis keturunan laki-laki atau patrilineal yang menyebabkan laki-laki dalam keluarga menjadi sangat dominan bila dibandingkan dengan kedudukan anak perempuan. Dalam adat Lampung Saibatin juga dijelaskan bahwa hanya anak tertua laki-laki dari keturunan yang paling tua yang bisa menjadi raja (pemimpin) dalam keadatan Lampung Saibatin.

B. Saran

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan, penulis mencoba memberikan sumbangsih pemikiran sebagai masukan dalam rangka menjalankan proses kedudukan anak tertua laki-laki dalam adat lampung saibatin di kabupaten pesisir barat. Adapun sarannya adalah sebagaiberikut:

1. Kepada masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat agar dapat terus mempertahankanadatbudaya yang telahada. Sehinggaadat Lampung saibatinbisaterusberkembangdantidakmusnahditelanzamandantidakmenjaditamud irumahsendiri.
2. Kepada tokoh adat agar lebih mengenalkan adat budaya Lampung saibatinkepadaparagenerasimuda, agar adat budayaLampung saibatintetapterjaga.
3. Kepada generasi muda agar menanamkan rasa cinta terhadap adat budayanyasendiridengantetapmenjagadanmempelajarikembaliadatbudaya Lampung saibatinsehinggaadatLampung saibatintetap terjaga dan terlindungi.
4. Saran bagi peneliti selanjutnya, untuk melakukan penelitian selanjutnya tentang kedudukan anak tertua laki-laki dalamadatLampung saibatin, denganmenggunakantechnikdanteori yang berbeda agar mendapatkanhasil yang lebihmaksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahan juz 1-30 (Edisi baru) Departemen Agama RI, (Tri Karya Surabaya), Qs.An-Nissa : 34, h. 176
- Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 221.
- Anissa Tanjung Sari, S.H., “Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua dari Hasil Perkawinan Leviraat dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Lampung Pepadun” *Tesis Magister Kenotariatan*, (Universitas Diponegoro, 2005), h. 14
- Bapak Ahmad Darsan S.Pd kepala adat pekon Tanjung Jati Kec Lemong Kab Pesisir Barat, *Wawancara* 08 Juni 2018
- Buku Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan daerah tingkat I Lampung , Bab : II pasal 3. h. 11.¹
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 193.
- <http://www.artikata.com/arti-360090-pembinaan.html>, diakses 18 Januari 2016
- Hadikusuma, Hilma. *Pengantar Ilmu Adat Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 16
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 1197
- Husein Muhammad Yusuf , *Keluarga Muslim dan Tetangganya*, Cet 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h 69.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 17-18.
- I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, (Semarang, Universitas Diponegoro, 1995).h.12
- Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : PT. Remaja Rosdarya, 1995), h. 57
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung : 2001, h. 3, dikutip skripsi Miskham, h. 13.

- Muhammad Musa, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Fajar Agung, 1998), h. 8
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 37
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: Citra Aditya Bakti, 2008), h. 40-41.
- Muhammad Amin Summan, *Hukum keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2005), h. 15.
- Prof. Dr. I Gede A. B. Wiranata, S.H., M.H., *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa* (Malang: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 3.
- Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelilitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Alfabeta : Jl. Gegerkalong Hilir Bandung, 2015), h. 21
- Projodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. (Sumur, Bandung. 1976), h. 45
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Surabaya: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 6-7
- Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan praktek (Jakarta: PT rineka cipta, 2010), h. 173
- Soepomo, *Hubungan Individu alam Hukum Adat*, (Pradanya Paramita, Jakarta, 1983). h. 49.
- Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, (Kurnia Era, Jakarta, 1981), h. 45.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Gunung Agung, Jakarta, 1968), h. 68.
- Simanjuntak B.I.L Pasaribu *membina dan mengembangkan generasi muda* (bandung: Tarsito, 1990), h. 84
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 25.
- Soerjono, Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: PT.Raja grafindo Persada, 2003), h. 148
- Van Vollenhoven, *hukum adat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1981) : ,h. 5

V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta : 2014, h 32.

W.golo, metedologi penelitian (Jakarta: PT grasendo 2010), h. 116.



LAMPIRAN



DAFTAR SAMPEL

No	Nama	Keterangan
1	Ahmad Darsan Spd	Selaku Raja Adat Saibatin Tanjung Jati
2	Yumansir	Raja Penyimbang Adat Saibatin
3	Supahan	Selaku Dalom Mangku Alam
4	Tambat	Selaku Penyimbang Adat
5	Muhammad Samsi	Raja Adat



PEDOMAN PENGUMPULAN DATA

A. PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja tugas dan tanggung jawab anak tertua laki-laki dalam adat lampung saibatin sebagai anak yang dituakan ?
2. Apa kedudukan anak tertua laki-laki dalam adat lampung?
3. Apa permasalahan yang pernah bapak alami selama menjalankan kedudukan anak laki-laki tertua ?
4. Apa penyebab luntur atau hilangnya keadatan lampung saibatin yang Bapak ketahui ?
5. Pernakah menemukkan permasalahan saat dalam pelaksanaan tanggung jawab kedudukan dalam adat lampung saibatin?
6. Apa paktor penyebabnya sekarang ini, anak tertua laki-laki tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya?
7. Apa tanggung jawab anak laki-laki tertua sabagai pengayom keluarga?
8. Apa tugas dan tanggung jawab anak tertua laki laki terhadap keluarganya sebagai ahli waris ?
9. Apa tanggung jawab anak tertualaki-lakisebagai pemimpin keluarga?
10. Adakah permasalahan yang terjadi saat ini pada anak laki-laki tertua sebagai pengayom keluarga?

B. PEDOMAN OBSERVASI

1. Mengamati Keadatan Kabupaten Pesisir Barat
2. Mengamati Fasilitas dan Sarana Penunjang Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Pesisir Barat
3. Mengamati kedudukan Anak Tertua Laki-laki Dalam Adat Lampung Saibatin di Pesisir Barat
4. Mengamati proses pelaksanaan Adat dan budaya Pesisir Barat

C. PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Profil Kabupaten Pesisir Barat
2. Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Barat



KARTU KONSULTASI

Nama : Mizarwan
Npm : 1341040108
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam
Pembimbing 1 : Dr. Hasan Mukmin, M.Ag
Pembimbing II : Badaruddin, S.Ag. M.Ag
Judul Skripsi : Kedudukan Anak Tertua Laki-Laki Dalam Adat Lampung Saibatin Di Kabupaten Pesisir Barat

No	Tanggal	Keterangan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	10 Januari 2018	Pengajuan judul proposal		
2	27 April 2018	Acc seminar proposal		
3	11 Mei 2018	Seminar proposal		
4	18 Mei 2018	Bimbingan bab 1-2		
5	20 Juni 2018	Acc bab 1-2		
6	3 Agustus 2018	Bimbingan bab 1-3		
7	22 Agustus 2018	Acc bab 1-3		
8	27 Agustus 2018	Bimbingan bab 1-5		
9	14 September 2018	Acc bab 1-5		
10	September 2018	Acc munaqosah		

Bandar Lampung, September 2018
Ketua Jurusan BKI,

Hj. Rini Setiawati, M. Sos.I
NIP. 197209211998032002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 78088

KARTU TANDA HADIR SIDANG MUNAQOSAH

Nama : Mizarwan
NPM : 1341040108
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam

No	Nama	Judul	Sekretaris Sidang	Paraf
1	M Iqbal Ardiansyah	Pendistribusian zakat pada lembaga amil zakat infaq shadaqoh (lazis) Al-Wasi, Universitas Lampung	M. Husaini, Mt	
2	Dian eriza	Peranan petugas (PKA lembaga pembinaan khusus anak) kelas II Bandar Lampung dalam pembinaan anak didik tindak pidana kriminal.	Umi Aisyah M.Pd.I	
3	Hardianto Saputra	Metode rehabilitasi dampak narkoba diwisma ataraxis Jati Agung Lampung Selatan	Umi Aisyah M.Pd.I	
4	M Afrizal Anam	Konseling individu sebagai upaya penanganan kenakalan siswa di SMA Miftahul Anwar Lampung Selatan	Umi Aisyah M.Pd.I	
5	Anton Susanto	Pola komunikasi guru dalam pembinaan akhlak siswa SMK AL-Fajar Kasui Way Kanan	Nasruddin S.Sos	

Bandar Lampung, september 2018

**Mengetahui
Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam**

Hj. Rini Setiawati, M. Sos.I
NIP. 197209211998032002

